





#### Editorial

**DAFTAR ISI** 

Refocusing itu Penting

#### 5 Topik Utama

- · Cost Recovery versus Gross Split: Keuntungan dan Tantangan
- · Implementasi Gross Split dan Masa Depan Industri Migas
- · Blok Migas Balik ke Skema Cost Recovery, Ini Alasannya

#### 21 Isu Aktual

Skema Baru Perhitungan PPh 21

#### 29 Infografik

#### 31 Karakteristik Industri Migas

Mengenal Participating Interest 10% Bagi Badan Usaha Milik Daerah

#### **Pencapaian KPP Migas**

Catatan Pencapaian Penerimaan PBB KPP Migas; 12% untuk 101%

#### 45 Serba Serbi Migas

Pembukuan bagi Wajib Pajak KKKS

#### 49 Tokoh Inspiratif

Desti Melanti, Srikandi Penjaga Migas Indonesia

#### 55 Rubrik Khusus

Women Empowerment:

Peran Wanita Indonesia di Industri Pertambangan Migas

#### 61 Aksi Migas

Empowering the Energy of Diversity, Town Hall Meeting KPP Migas 2024, Emang Boleh Sekeren ini?

#### 69 Serba Serbi Foto

#### 75 Resensi

Ketika Kesepian Menjadi Musuh Terbesar di Hari Tua

#### 79 Reportase

Diundang Kendurian di Lokasi Sumur Minyak Kisah Mistis di Sela Tugas

#### 85 Olahraga

Sepak Bola, Olahraga Populer dengan Segudang Manfaat

#### 91 Wisata

Pesona Gunung Merbabu dan Jalur Pendakiannya yang Bikin Nagih

#### 99 Kuliner

Kedai Rukun Yakarta, Pengobat Rindu Masakan Ibu di Perantauan

#### 103 Opini

- · Pegawai Perempuan DJP, Pengarusutamaan Gender atau Feminis?
- E-Bupot 21/26; Tanda Tanya Kepastian Hukum dalam Simplifikasi Penghitungan Pajak

#### 113 Pojok Migas

Labirin





#### Redaksi:

Pembina: Luky Priyanto

Pemimpin Redaksi: Evie Andayani, Agus Suharjono

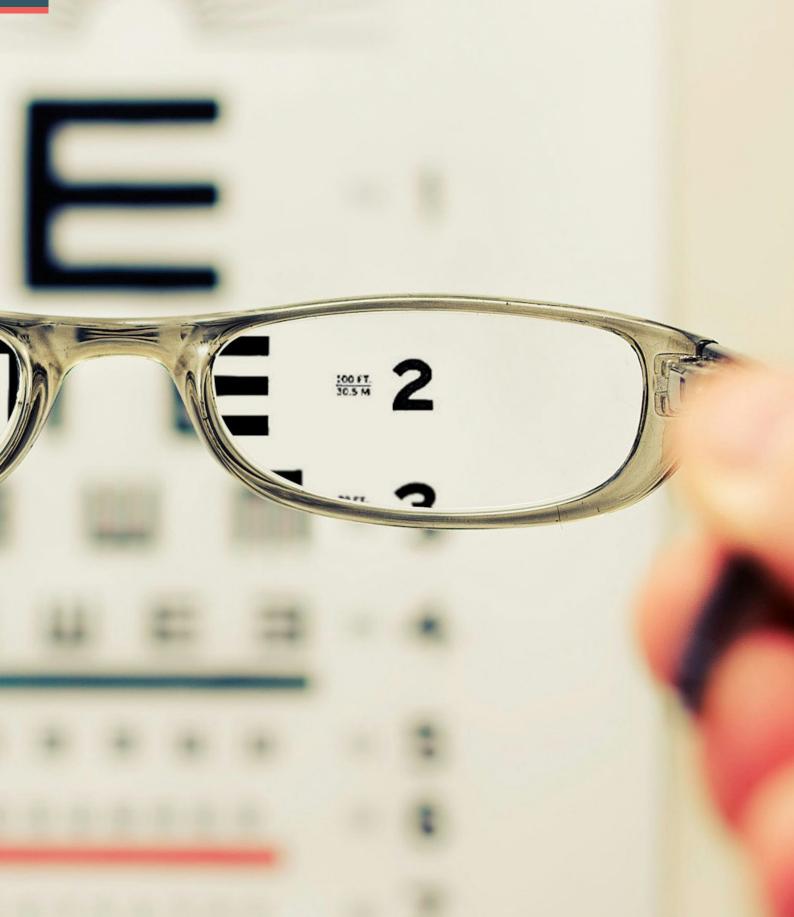
Redaktur Pelaksana: Ahmad Dahlan, Tobagus Manshor Makmun, Ifta Ilfia Utami,

Aditya Pradana Putra

**Kontributor:** Mudrik Nazari, Agus Wahyudi, Sharly Savina Putri, Angga Ardodika, I Made Pandu Widiyatmika, Desti Melanti, Florentina Hatmi, Diah Kurniawati, Listiani Dewi, Widyastuti, Anik Mailani, Kristiadi Nugroho, Markus Apriandhie, Indrayanti R Pangastuti, Triyono, Ifta Ilfia Utami, Ni Made Krishin Na Gara,

Murniasih, Dwi Cahyawati Adiningrum, Fajar Fadilah

Layouter: Triyono, Áditya Pradana Putra



# Refocusing The Penting



Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani wajib pajak (WP) yang beroperasi di industri minyak dan gas (migas), termasuk usaha jasa penunjang migas dan usaha geothermal. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal dan pengawasan yang efektif, KPP Migas sering dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah adanya perbedaan dalam penerapan aturan karena banyak regulasi yang belum sepenuhnya inline dengan karakteristik masing-masing kelompok usaha.

#### Kendala dalam Pelayanan dan Pengawasan

KPP Migas sering menghadapi kendala dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap WP karena regulasi yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok usaha. Beberapa kendala yang umum ditemui, antara lain, adanya inkonsistensi dalam penerapan aturan. Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi aturan perpajakan seringkali menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan aturan oleh petugas pelayanan dan pengawasan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi WP dan potensi sengketa pajak.

Kondisi seperti itu juga disebabkan adanya keterbatasan pemahaman spesifik sektor usaha. Petugas pajak mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang spesifikasi teknis dan operasional dari setiap kelompok usaha, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang efektif. Di samping itu, masih adanya regulasi perpajakan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik industri migas dan geothermal juga dapat menyulitkan penerapan kebijakan yang konsisten dan adil.

#### Kelompok Wajib Pajak Berdasarkan Core Bisnis

Untuk mengatasi tantangan di atas, KPP Migas berencana melakukan refocusing dengan mengelompokkan WP menjadi lima kelompok berdasarkan core bisnisnya, yakni WP KKKS Cost Recovery, WP KKKS Gross Split, WP Holding Company, WP Geothermal, dan WP Penunjang Migas. Masing-masing kelompok wajib pajak akan berada dalam satu seksi pengawasan. Dengan langkah ini, KPP Migas berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta pengawasan.

WP KKKS Cost Recovery merupakan perusahaan yang mendapatkan kontrak kerja sama dari pemerintah untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Dalam skema ini, biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diklaim kembali (cost recovery) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap WP ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme cost recovery dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berbeda dengan Skema Cost Recovery, KKKS Gross Split menerapkan pembagian pendapatan kotor antara pemerintah dan kontraktor sejak awal, tanpa ada mekanisme pengembalian biaya operasional. WP ini memerlukan pengawasan yang fokus pada akurasi perhitungan pendapatan kotor dan pembagian yang sesuai dengan kontrak.

WP Holding Company adalah perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di industri migas. Pengawasan terhadap WP ini melibatkan analisis laporan keuangan konsolidasi dan pemahaman tentang transaksi antar perusahaan dalam satu grup.

Industri geothermal (panas bumi) memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri migas konvensional. Pengawasan terhadap WP geothermal memerlukan pengetahuan khusus tentang teknologi, biaya operasional, dan regulasi yang berlaku di sektor ini.

#### Strategi dalam Refocusing

Beberapa strategi yang sedang dan akan diimplementasikan dalam refocusing, yang pertama adalah menginventarisasi permasalahan per fokus kelompok wajib pajak. Inventarisasi issue berdasarkan kelompok fokus wajib pajak menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh KPP Migas. Setiap kelompok memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang harus diidentifikasi secara spesifik.

Berdasarkan strategi yang pertama, KPP Migas akan menyelaraskan dengan aturan perpajakan yang telah ada. Jika ternyata masih terdapat aturan yang belum selaras dengan *issue* fokus wajib pajak, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengharmonisasikan regulasi perpajakan yang spesifik untuk setiap kelompok usaha, sehingga aturan yang berlaku lebih jelas dan sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor.

Strategi selanjutnya, mengadakan pelatihan khusus secara rutin bagi petugas pajak untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknis dan operasional dari setiap kelompok usaha. Ini termasuk pemahaman tentang mekanisme cost recovery, gross split, dan regulasi geothermal.

Strategi yang tak kalah penting yang merupakan bagian dari refocusing adalah meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk perusahaan migas, geothermal, dan penyedia jasa penunjang. Diskusi dan konsultasi reguler dapat membantu menyelaraskan pemahaman dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan regulasi. Langkah ini bisa dilakukan dalam wujud diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) ataupun dalam bentuk lain.

Refocusing pengelompokkan wajib pajak menjadi lima kelompok berdasarkan core bisnisnya merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat mengatasi kendala dalam pelayanan dan pengawasan yang dihadapi oleh KPP Migas. Dengan penyusunan regulasi yang lebih spesifik, pelatihan yang tepat, peningkatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif, KPP Migas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak KPP Migas, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan. (Ardiyanto Basuki)





# Cost Regovery Grossplit

#### Keuntungan dan Tantangan

ndustri minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam ini membutuhkan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan investasi serta optimalisasi pendapatan negara.

Di Indonesia, terdapat dua model kontrak utama yang diterapkan dalam pengelolaan migas, yaitu Cost Recovery dan Gross Split. Tulisan ini akan membahas kapan kedua model ini diterapkan di Indonesia, cara kerja masing-masing model, keuntungan yang ditawarkan, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan migas dan pemerintah dalam implementasinya, serta dampak kedua model terhadap pendapatan negara.

#### Penerapan Model *Cost Recovery* dan *Gross Split* di Indonesia

Model Cost Recovery mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1960-an. Pada masa itu, pemerintah Indonesia menerapkan sistem Production Sharing Contract (PSC) yang memberikan hak kepada kontraktor untuk memulihkan biaya operasionalnya dari hasil produksi migas. Model ini menjadi dasar kontrak antara pemerintah dan kontraktor migas dengan cara kontraktor diberikan hak untuk mengembalikan biaya eksplorasi dan produksi dari sebagian hasil migas yang dihasilkan.

Sedangkan model Gross Split diperkenalkan pada tahun 2017 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017. Model ini merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan migas. Dalam model ini, pembagian hasil produksi migas antara pemerintah dan kontraktor ditentukan sejak awal berdasarkan formula yang tetap, tanpa melalui mekanisme penggantian biaya operasional seperti pada model Cost Recovery.

#### Cara Kerja Model Cost Recovery dan Gross Split

Terdapat beberapa tahapan cara kerja pada masing-masing model PSC. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut.

#### **Cost Recovery:**

Tahapan kerja model ini adalah, yang pertama, tahap eksplorasi dan produksi. Pada tahap ini, kontraktor melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi dengan biaya sendiri. Tahap selanjutnya adalah penggantian biaya (*Cost Recovery*). Pada tahap ini, kontraktor mengajukan penggantian biaya operasional kepada pemerintah dari hasil produksi migas. Tahapan ini bisa berlangsung beberapa tahun hingga seluruh biaya eksplorasi tertutupi oleh hasil produksi migas. Selama biaya eksplorasi tersebut belum tertutupi seluruhnya, pemerintah belum memperoleh bagi hasil.

Tahap terakhir cara kerja pada model *Cost Recovery* adalah pembagian hasil (*profit sharing*). Setelah penggantian seluruh biaya operasional, sisa hasil produksi dibagi antara kontraktor dan pemerintah sesuai dengan ketentuan kontrak PSC.

#### **Gross Split:**

Tahapan kerja model ini adalah, yang pertama penentuan formula split. Pada tahap awal ini, pemerintah dan kontraktor menyepakati formula pembagian hasil produksi berdasarkan parameter utama (base split), parameter variabel (variable split) yang mencakup berbagai faktor seperti lokasi, tingkat kesulitan teknis, dan harga minyak dunia, dan parameter progresif (progressive split) yang meliputi harga migas dan jumlah kumulatif produksi. Tahapan selanjutnya adalah eksplorasi dan produksi. Pada tahap ini, kontraktor melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi dengan biaya sendiri.

Cara kerja model *Gross Split* juga diakhiri dengan pembagian hasil (*profit sharing*). Pada tahap akhir ini, hasil produksi langsung dibagi sesuai dengan formula split yang telah disepakati tanpa penggantian biaya operasional. Jadi pada model *Gross Split* ini, pemerintah mendapat bagi hasil migas langsung dari hasil produksi migas bukan dari sisa hasil produksi setelah dikurangi biaya operasional.



#### **Keuntungan Masing-Masing Model**

Baik model *Cost Recovery* maupun *Gross Split*, masing-masing memiliki keuntungan. Berikut ini merupakan keuntungan penggunaan kedua model tersebut, baik bagi perusahaan migas itu sendiri maupun bagi pemerintah.

#### **Cost Recovery:**

Bagi perusahaan migas, keuntungan penggunaan model Cost Recovery, yang pertama adalah perlindungan investasi. Karena akan mendapatkan penggantian biaya operasional, kontraktor mendapat kepastian pengembalian biaya investasi. Hal ini menarik bagi investasi jangka panjang. Keuntungan yang kedua adalah fleksibilitas operasional. Kontraktor memiliki kebebasan dalam menentukan strategi operasional untuk memaksimalkan produksi.

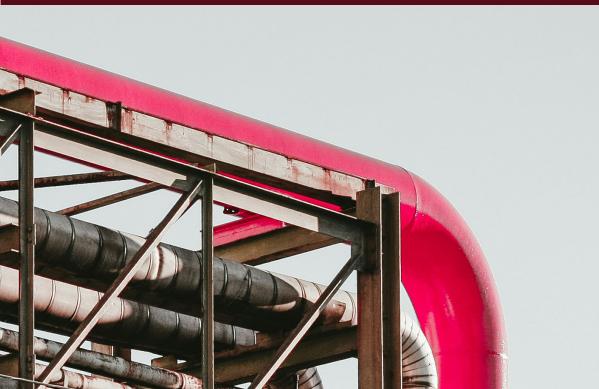
Sedangkan bagi pemerintah, keuntungan yang akan didapat pada penggunaan model Cost Recovery, yang pertama adalah pengawasan biaya. Pemerintah dapat mengawasi dan mengontrol biaya operasional yang diklaim oleh kontraktor. Hal ini untuk memastikan biaya yang diajukan wajar dan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, keuntungan yang didapat adalah optimalisasi pengelolaan cadangan. Dengan adanya kontrol yang ketat atas biaya operasional, pemerintah

dapat memastikan bahwa pengelolaan cadangan migas dilakukan secara optimal dan efisien, menghindari pemborosan, dan memastikan keberlanjutan produksi.

#### **Gross Split:**

Sedangkan apabila model yang digunakan adalah *Gross Split*, keuntungan yang akan diperoleh bagi perusahaan migas adalah, yang pertama, sederhana dan transparan. Model ini lebih sederhana karena tidak memerlukan proses verifikasi penggantian biaya, mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Keuntungan yang kedua, efisiensi operasional. Kontraktor memiliki kepastian pembagian hasil sejak awal, mendorong efisiensi operasional karena tidak perlu fokus pada penggantian biaya.

Sementara bagi Pemerintah, penggunaan model *Gross Split* akan memperoleh keuntungan, yang pertama adalah pendapatan yang stabil. Pemerintah mendapatkan pendapatan yang lebih stabil karena tidak bergantung pada



klaim biaya operasional kontraktor. Keuntungan yang kedua adalah adanya pengurangan risiko pembengkakan biaya. Dengan model Gross Split, risiko biaya operasional yang membengkak sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Pemerintah tidak perlu khawatir tentang pengeluaran yang melebihi anggaran karena bagian pemerintah dari pendapatan ditentukan sejak awal berdasarkan kesepakatan bagi hasil.formula split yang telah disepakati tanpa penggantian biaya operasional. Jadi pada model Gross Split ini, pemerintah mendapat bagi hasil migas langsung dari hasil produksi migas bukan dari sisa hasil produksi setelah dikurangi biaya operasional.





#### Tantangan dalam Implementasi

Di samping memiliki keuntungan, masing-masing model PSC juga memiliki tantangan, baik dari sisi perusahaan migas maupun dari sisi pemerintah. Berikut adalah tantangan tersebut pada kedua model PSC.



#### **Cost Recovery:**

Bagi perusahaan migas, penggunaan model cost recovery memiliki tantangan, yang pertama adanya kompleksitas administrasi. Proses verifikasi biaya operasional sering kali rumit dan memakan waktu, menghambat operasional. Tantangan yang kedua, terdapatnya ketidakpastian pembayaran. Klaim pengembalian biaya yang ditolak atau dipotong dapat menyebabkan ketidakpastian finansial bagi kontraktor.

Sementara bagi pemerintah, model Cost Recovery memiliki tantangan, yang pertama adanya potensi penyalahgunaan. Model ini memungkinkan terdapatnya risiko kontraktor melaporkan biaya yang tidak wajar untuk mendapatkan penggantian lebih besar. Tantangan kedua, perlu adanya pengawasan intensif. Pemerintah harus melakukan pengawasan intensif terhadap klaim biaya operasional sehingga membutuhkan sumber daya yang besar.

#### **Gross Split:**

Pada penggunaan model *Gross Split*, tantangan bagi perusahaan migas berupa, yang pertama, adanya risiko investasi. Pada model ini, kontraktor menanggung seluruh risiko biaya operasional tanpa jaminan pengembalian. Hal ini dapat mengurangi minat investasi. Yang kedua, penentuan *split* yang adil bagi kedua belah pihak. Menentukan *formula split* yang adil dan mengakomodasi berbagai kondisi lapangan migas bisa menjadi tantangan tersendiri.

Sedangkan bagi pemerintah, penggunaan model Gross Split memiliki tantangan, yang pertama adalah kurangnya kontrol atas operasi. Pada model ini, pemerintah memiliki kontrol yang lebih sedikit atas biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor dibandingkan dengan model Cost Recovery. Ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan potensi pembengkakan biaya yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Yang kedua, sulitnya pengawasan dan regulasi. Pengawasan dan regulasi atas aktivitas kontraktor menjadi lebih sulit karena pemerintah tidak lagi terlibat dalam persetujuan dan verifikasi biaya operasi. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa kontraktor menjalankan operasi dengan efisien dan sesuai dengan peraturan.

#### **Dampak terhadap Pendapatan Negara**

Dampak terhadap pendapatan negara pada masing-masing model PSC, bervariasi berdasarkan struktur masing-masing model dan beberapa faktor lain. Namun secara umum dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini.

#### **Cost Recovery:**

Model Cost Recovery memberikan dampak yang relatif stabil terhadap pendapatan negara karena pemerintah mendapatkan bagian setelah biaya operasional dikembalikan kepada kontraktor. Namun, model ini rentan terhadap fluktuasi biaya operasional yang dapat mempengaruhi besaran pendapatan negara. Selain itu, potensi penyalahgunaan klaim biaya oleh kontraktor dapat mengurangi pendapatan negara secara signifikan.

#### **Gross Split:**

Pemerintah berharap, penggunaan model *Gross Split* mampu meningkatkan pendapatan negara dengan mekanisme pembagian yang lebih sederhana dan transparan. Tanpa adanya penggantian biaya operasional, pendapatan negara bisa lebih stabil dan prediktif. Namun, penurunan minat investasi karena risiko yang lebih tinggi bagi kontraktor bisa menjadi tantangan yang mengurangi potensi pendapatan jangka panjang.

Baik model *Cost Recovery* maupun *Gross Split* memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model *Cost Recovery* memberikan kepastian pengembalian biaya bagi kontraktor tetapi memerlukan pengawasan ketat dan berpotensi rentan terhadap penyalahgunaan. Di sisi lain, model *Gross Split* menawarkan kesederhanaan dan efisiensi tetapi meningkatkan risiko bagi kontraktor yang dapat mempengaruhi minat investasi.

Dalam konteks pendapatan negara, model *Gross Split* memiliki potensi untuk memberikan pendapatan yang lebih stabil dan prediktif, namun memerlukan penyesuaian dalam formula split untuk memastikan keadilan dan mengakomodasi berbagai kondisi lapangan migas. Pemerintah perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan migas serta keberlanjutan investasi di sektor ini.

Pada akhirnya, pilihan antara kedua model ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kondisi lapangan, risiko investasi, serta tujuan jangka panjang pemerintah dalam mengelola sumber daya migas. Kombinasi atau modifikasi dari kedua model ini juga dapat menjadi solusi untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara menarik investasi dan memaksimalkan pendapatan negara.

Penulis: Ahmad Dahlan Editor: Evie Andayani





# Implementasi Gross Split Lon Masa Depan Industri Migas



Pada Januari 2017, pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrak baru pengelolaan blok migas di Indonesia yaitu *production sharing contract* (PSC) *Gross Split*. Kebijakan tersebut efektif berlaku sejak terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Dalam PSC Gross Split, perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor diperhitungkan di awal. Total bagi hasil sebelum pajak yang akan didapatkan oleh kontraktor merupakan hasil penjumlahan dari bagi hasil dasar (base split), komponen pembagian sesuai kondisi lapangan (variable split), dan komponen yang nilainya terus berubah (progressive split). Kontrak ini lebih mirip dengan model royalti.



#### Polemik Cost Recovery

Salah satu faktor pendorong diterapkannya PSC Gross Split adalah untuk menghilangkan perdebatan terkait penggantian biaya (cost recovery). Contoh nyata perdebatan cost recovery adalah pada saat pengajuan POD (Plan of Development). Ada dua hal utama dalam POD. Pertama biaya dan kedua program kerja. Yang terjadi selama ini adalah masalah biaya menjadi isu yang penting.

Estimasi biaya yang masih menyisakan ketidakpastian, membuat SKK Migas akan melihat lebih dalam apakah biaya yang diajukan oleh kontraktor, sesuai dengan harapan untuk selalu menekan cost recovery. Adanya perdebatan ini menyebabkan persetujuan POD pada PSC Cost Recovery membutuhkan waktu lama. Bisa lima tahun, sepuluh tahun, bahkan di atas itu, sehingga menjadi tidak efisien dan memperlambat proses atau tahap kegiatan berikutnya.

Karena akurasi biaya yang masih menjadi perdebatan panjang tersebut, maka cost recovery sering dicurigai sebagai akar permasalahan, dan secara tidak langsung sering dinilai menjadi sarana untuk menyalahgunakan dana operasi migas. Oleh sebab itu mekanisme perhitungan konsep PSC Gross Split yang menghapus cost recovery dinilai cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

#### Tujuan Jangka Panjang

Jika tujuan utama penerapan PSC Gross Split adalah untuk menghilangkan polemik dan perdebatan terkait cost recovery, maka kebijakan tersebut telah berhasil. Dengan dihapusnya cost recovery dari mekanisme perhitungan konsep PSC Gross Split, secara otomatis tidak lagi terdapat polemik dan perdebatan mengenai cost recovery.

Namun demikian, semestinya tujuan penerapan kebijakan untuk kegiatan usaha hulu migas jauh lebih besar dari sekadar menghilangkan polemik dan



perdebatan mengenai cost recovery. Lebih dari itu, kebijakan seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja usaha hulu migas itu sendiri yang direpresentasikan melalui meningkatnya jumlah cadangan dan produksi/lifting migas nasional.

Jika dikaitkan dengan jumlah cadangan dan tingkat *lifting*, maka keefektifan dan keberhasilan PSC *Gross Split* masih perlu waktu untuk pembuktian. Terkait lifting minyak misalnya, data menunjukkan bahwa selama periode setelah penerapan PSC *Gross Split*, *lifting* minyak nasional berada pada tren yang menurun. Pada tahun 2016, ketika belum diterapkan PSC *Gross Split*, realisasi *lifting* minyak Indonesia mencapai 829 ribu barel per hari (mbopd)

Sementara, realisasi *lifting* minyak pada 2022 berdasarkan data turun menjadi 612 mbopd. Bahkan turun menjadi 605,5 mbopd di tahun 2023. Tidak hanya





minyak, *lifting* gas juga berdasarkan data turun dari 1.200 mboepd pada 2016 menjadi sekitar 955 mboepd pada 2022, dan 960 mboepd di tahun 2023. Tentunya penyebab turunnya *lifting* migas Indonesia bukan disebabkan oleh faktor tunggal sehingga tidak sepenuhnya tepat apabila hanya mengaitkan penurunan *lifting* migas Indonesia dengan implementasi kebijakan PSC *Gross Split*.

#### Masa Depan Industri Migas

Kondisi bahwa pasca penerapan PSC Gross Split, lifting migas Indonesia terus menurun merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan minat investor, hasil dari implementasi PSC Gross Split sampai sejauh ini relatif masih jauh dari yang kita semua harapkan. Masih butuh waktu untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan cadangan minyak dan tingkat produksi nasional.

Pada dasarnya baik model PSC Gross Split maupun PSC Cost Recovery memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada stabilitas kebijakan pemerintah, kepastian hukum, dan bagaimana perusahaan migas menavigasi risiko yang ada.

Satu hal yang pasti, kita semua sepakat apapun jenis kontraknya, sudah seharusnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan jumlah cadangan dan *lifting* migas, untuk ketahanan energi nasional, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis yang diambil dari berbagai sumber, tidak mewakili kantor atau instansi.)

Penulis: Mudrik Nazari Editor: Ahmad Dahlan

# Blok Migas Balik ke Skema Cost Recovery, Ini Alasannya



Sejak tahun 2017, pemerintah memperkenalkan skema kontrak bagi hasil Gross Split melalui Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017, yang kemudian disempurnakan oleh berbagai peraturan berikutnya. Namun, dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020, kontraktor migas diberi pilihan untuk kembali menggunakan skema Cost Recovery. Langkah ini diambil setelah evaluasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di industri migas.

Penerapan satu model yakni *Gross*Split untuk semua kontraktor dianggap oleh banyak kalangan kurang fleksibel dan tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan kontraktor.
Dengan memberikan pilihan, kontraktor dapat memilih skema yang paling sesuai dengan karakteristik lapangan dan strategi bisnis mereka. Pemerintah berharap, dengan terbitnya Permen ESDM Nomor 12, pencapaian target produksi satu juta barel per hari lebih dekat untuk diraih.

Penerbitan Permen ESDM tersebut seolah membawa angin segar bagi industri migas. Beberapa blok migas yang semula menggunakan skema *Gross Split*, beralih ke skema *Cost Recovery*. Desti Melanti, yang saat menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Lingkungan Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, dalam suatu pertemuan menyampaikan penyebab kembalinya blok migas Gross Split melirik skema Cost Recovery. Menurutnya, pada era transisi energi saat ini, Industri hulu migas menghadapi tantangan untuk mampu menjadi lokomotif penggerak perekonomian melalui ketahanan energi. Target satu juta barel merupakan suatu target yang harus dicapai melalui beberapa terobosan di antaranya fleksibilitas bentuk kontrak kerjasama.

Lebih lanjut, Desti menyampaikan bahwa beberapa kemungkinan alasan perubahan bentuk skema bagi hasil migas dari skema Gross Split ke Cost Recovery adalah: (1) Secara normatif, skema Gross Split membuat economic limit tercapai lebih cepat, sehingga bagi kontraktor yang masih harus berinvestasi, pengembalian investasi menjadi lambat. (2) Dalam skema Gross Split, kontraktor tidak dapat menikmati keuntungan apabila ada kenaikan harga, karena terdapat progressive split yang membuat split berkurang apabila harga hidrokarbon tinggi. (3) Hubungannya dengan risiko yang ditanggung kontraktor, dalam



skema *Gross Split*, kontraktor harus menanggung risiko 100% karena *cost* operasional sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor, tidak ada sharing risk yang proporsional dengan pemerintah seperti pada skema *Cost Recovery*. Hal ini membuat secara *terms*, kurang menarik untuk kontraktor.

Sementara itu, di tempat terpisah beberapa kontraktor menyampaikan bahwa skema PSC Gross Split memerlukan pendanaan yang sangat besar karena seluruh biaya produksi ditanggung oleh kontraktor. Sekalipun masih pada tahap eksplorasi, namun biaya tinggi tersebut murni harus dipikul oleh kontraktor. Hal ini tentu saja memberatkan bagi kontraktor untuk menggunakan skema Gross Split. Walaupun tentu saja biaya produksi yang tinggi itu pada standar pelaporan keuangan dapat dibebankan dan bahkan menjadi kompensasi rugi. Namun, kompensasi rugi yang diperkenankan hanya lima tahun, sementara kerugian yang dialami bisa mencapai lebih dari lima tahun.

Masih menurut beberapa kontraktor migas, bahwa dari sisi pemerintah, memang menjadi lebih menguntungkan apabila kontraktor menggunakan skema PSC Gross Split, karena pemerintah tidak perlu memikul biaya produksi sampai keuntungan lifting itu dibagikan kepadanya. Namun pemerintah perlu berhitung juga terhadap risiko rendah lifting apabila ternyata skema PSC Gross Split tersebut mengakibatkan para kontraktor malas berproduksi.

Taruhan kemandirian produksi migas yang akan menyokong industri lainnya sehingga kemandirian bangsa ini dapat ditegakkan akan pupus ketika hal tersebut tidak menguntungkan atau membuat enggan para K3S untuk berproduksi. Oleh karena itu diperlukan kajian dan pertimbangan yang mendalam dari pemerintah untuk berhitung untung

ruginya dalam menentukan skema PSC pada para kontraktor.

Dengan diberikannya pilihan antara skema *Gross Split* dan *Cost Recovery*, kita semua berharap ada peningkatan investasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya migas di Indonesia. Kontraktor dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan mengelola proyek mereka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Fleksibilitas ini juga dapat meningkatkan produksi migas nasional, menjaga stabilitas pasokan energi, dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas.

Selain itu, harapan kita ke depannya kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah ini dapat menjadikan issue menarik bagi para investor untuk masuk dan memperluas investasinya pada bidang industri hulu migas. Oleh karenanya, cita-cita kemandirian migas dalam negeri segera terwujud yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Indonesia lebih luas lagi.

Penulis: Evie Andayani Editor: Ahmad Dahlan





## Skema Baru Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

rahasia umum bahwa Openghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) memiliki kompleksitas yang tinggi dan skema perhitungannya sangat bervariasi. Berdasarkan peraturan yang selama ini digunakan, yakni PER-16/PJ/2014, setidaknya ada 400 skema pemotongan PPh Pasal 21. Berbagai skema tersebut dapat membingungkan dan memberatkan secara administrasi bagi wajib pajak pemberi kerja yang berusaha melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengimplementasikan coretax administration system pada tahun ini yang berbasis kemudahan bagi wajib pajak.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58) tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di samping dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak, penerbitan PP 58 juga bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Hal itu sesuai dengan semangat reformasi DJP. Penerapan tarif PP 58 tidak menyebabkan tambahan beban pajak baru.

Berdasarkan PP 58, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan atas penghasilan bruto dengan dua jenis tarif pemotongan, yakni tarif umum sesuai Pasal 17 ayat (1) a huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (tarif Pasal 17) dan tarif efektif. Tarif Pasal 17 digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada masa terakhir pegawai bekerja dalam suatu tahun pajak sedangkan tarif efektif digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada suatu masa pajak selain masa pajak terakhir. Tarif efektif meliputi tarif efektif bulanan (TER Bulanan) dan tarif efektif harian (TER Harian). TER Bulanan dikategorikan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak, sedangkan TER Harian dikategorikan berdasarkan besaran penghasilan bruto harian. TER Bulanan dikelompokkan dalam tabel TER A (PTKP TK/0, TK/1, K/0), TER B (PTKP TK/2, K/1, TK/3, TK/2, K/2) dan TER C (PTKP K/3) (lihat)informasi Tabel TER di bawah).

Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168) sebagai aturan pelaksanaan PP 58 dan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 di luar skema tarif PP 58. PMK 168 mengatur secara detail pemotong dan penerima penghasilan, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau 26, dasar pengenaan pajak, tarif pemotongan, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau 26, penghasilan dan pemotongan

pegawai tetap (pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI dan pensiunannya), saat terutang, dan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau 26. Pokok-pokok pengaturan dalam PMK 168 meliputi:

- 1. Perubahan skema perhitungan
  - a. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap (untuk masa pajak selain masa pajak terakhir) dan pegawai tidak tetap;
  - b. Memperluas lingkup penghitungan PPh Pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun dari hanya dana pensiun menjadi juga berlaku untuk lingkup BPJSTK, ASABRI, TASPEN;
  - c. Pengurangan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dalam penghasilan bruto PPh Pasal 21;
  - d. Menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 DTP dan penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh berupa bantuan, sumbangan, hibah;
  - e. Pemotongan PPh Pasal 21 atas natura/kenikmatan;
  - f. Tidak dibedakan skema penghitungan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan;
- 2. Penyesuaian pengaturan
  - a. Mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan bagi OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas pemberi kerja dan organisasi internasional

- berdasarkan perjanjian internasional;
- b. Menggabungkan PMK biaya jabatan/biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian;
- c. Menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep dalam PMK-141/2015;
- d. Mengatur tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan yang semula diatur dalam peraturan Dirjen Pajak;
- e. Menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan (bupot) dan tidak ada kewajiban pembuatan bupot jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan;
- f. Lebih bayar karena pembetulan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan;
- g. PNS membuat surat pernyataan dua pemberi kerja.



Lampiran PMK 168 memberikan petunjuk tata cara pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau 26. Berikut adalah skema pemotongan PPh Pasal 21:

#### 1. Pegawai Tetap dan Pensiunannya

a. Penghasilan setiap masa kecuali masa pajak terakhir

#### Tarif

#### Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan

Penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan yang diterima pada masa tersebut selain penghasilan yang dikecualikan dalam PMK 168. Jika dalam satu masa terjadi pembayaran penghasilan beberapa kali maka penghasilan bruto diambil dari penjumlahan seluruh penghasilan yang diterima tersebut.

b. Penghasilan masa pajak terakhir

#### **Tarif**

((Ph. Bruto setahun – Biaya Jabatan/Pensiun – Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja – PTKP) x Tarif Ps. 17) - PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir

Zakat/sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto sepanjang zakat/sumbangan keagamaan tersebut disalurkan melalui badan atau lembaga yang pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

#### 2. Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif
<= Rp450 ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450 ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian
>= Rp2,5 juta/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto
Dibayar bulanan	Tarif Efektif Bulanan x Ph Bruto

Penghasilan yang dibayarkan kepada bukan pegawai tidak lagi menggunakan skema berkesinambungan dan tidak berkesinambungan sehingga jika dalam satau masa pajak terdapat beberapa kali pembayaran maka dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap pembayaran.

#### 3. Bukan Pegawai

Tarif

Tarif Psl 17 x (Ph. Bruto x 50%)

Penghasilan yang dibayarkan kepada bukan pegawai tidak lagi menggunakan skema berkesinambungan dan tidak berkesinambungan sehingga jika dalam satau masa pajak terdapat beberapa kali pembayaran maka dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 pada setiap pembayaran.

#### 4. Subjek Lain

Subjek Pajak	Tarif
Peserta Kegiatan	
Pegawai menarik uang terkait pensiun	Psl 17 x Ph. Bruto
Mantan pegawai menerima bonus	
Dewas/Dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur	TER Bulanan x Ph. Bruto

Perubahan skema penghitungan PPh Pasal 21 juga diikuti dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Peraturan dirjen ini mengatur tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 serta bentuk, isi, cara pengisian, dan tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Peraturan dirjen tersebut menyesuaikan dengan pemberlakuan

skema penghitungan PPh Pasal 21 dengan menyediakan Formulir 1721-VIII untuk bukti pemotongan bulanan serta hanya menyediakan satu jenis Formulir 1721-A1 untuk penghasilan yang diterima pada masa pajak terakhir. Pembuatan bukti pemotongan sekaligus pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Bupot 21/26 yang telah disediakan oleh DJP.



#### DAFTAR TABEL TER

**TER A** = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan	TERA		
1	sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50 %
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%

No	Lapisan I	Penghasilan	Bruto (Rp)	TERA
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih		1.400.000.000	34,00%

#### **TER B** = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TERB
1	sampai d	sampai dengan		0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50 %
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TERB	
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari		1.405.000.000	34,00%

#### **TER C** = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan	TERC		
1	sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50 %
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TERC
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d.	221000.000	27,00%
35	221000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561000.000	30,00%
38	561000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari		1.419.000.000	34,00%

#### TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian/Tarif	
<= Rp450 ribu/hari	0% x Ph Bruto Harian	
> Rp450 ribu/hari – Rp2,5 juta/hari	0,5% x Ph Bruto Harian	

Penulis: Agus Wahyudi Editor: Ahmad Dahlan



## CERMAT PEMOTONGAN

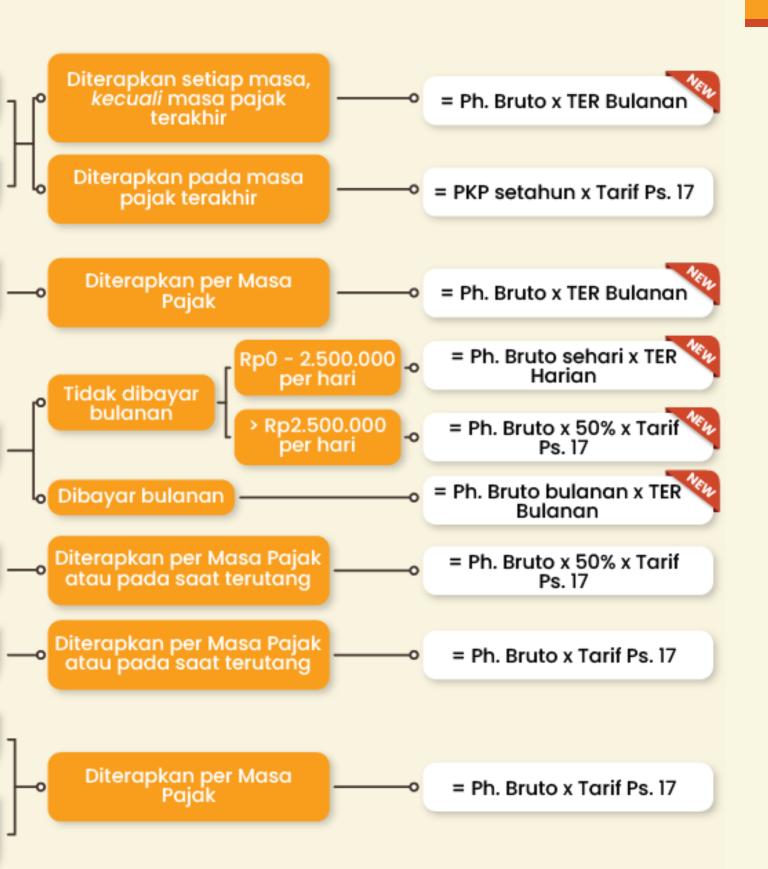
PPh Pasal 21/26



DIAN ANGGRAENI ANGGA SUKMA DHANISWARA

### RESUME SKEMA PMK-168/2023





Infografik: Sharly Savina Putri

# Mengenal Participating Interest 10% bagic Badan Usaha Milik Daerah



Orticipating interest (PI) 10% adalah salah satu bentuk keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Ketentuan mengenai PI 10% ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. PI 10% merupakan hak partisipasi BUMD sebesar 10% dalam suatu kontrak kerja sama di sektor hulu migas tanpa kewajiban mengeluarkan dana untuk eksplorasi, pengembangan, dan produksi, tetapi BUMD berhak menerima keuntungan dari bagi hasil produksi.



Penawaran PI 10% merupakan besaran maksimal pada kontrak kerjasama yang wajib diberikan oleh kontraktor kepada BUMD. Kontraktor wajib menawarkan PI 10% tersebut sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut pada suatu wilayah kerja. BUMD yang belum mendapatkan penawaran PI 10% setelah disetujuinya rencana pengembangan lapangan, dapat diberikan penawaran PI 10% pada saat perpanjangan kontrak kerjasama atau saat pengelolaan wilayah kerja yang kontrak kerjasamanya berakhir.

Setiap BUMD hanya diberikan pengelolaan PI 10% untuk satu wilayah kerja. Dalam hal BUMD telah mengelola PI 10% pada suatu wilayah kerja atau telah mengusahakan wilayah kerja lain atau melakukan kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha hulu migas, PI 10% ditawarkan kepada BUMD yang baru. Namun demikian, jika PI 10% tidak dikelola oleh BUMD baru maka BUMD yang mendapat penawaran PI 10% dapat menunjuk perusahaan perseroan daerah.

BUMD yang mendapatkan penawaran PI 10% harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Ketentuan itu mengatur, bentuk BUMD dapat berupa perusahaan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah atau perseroan terbatas yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah, statusnya disahkan melalui peraturan daerah dan tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan PI pada suatu wilayah kerja.

Jika BUMD memutuskan penawaran PI 10% dikelola oleh perusahaan perseroan daerah maka pembentukannya harus sesuai ketentuan. Ketentuan dimaksud yaitu dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah, kepemilikan saham dimiliki oleh BUMD atau paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh BUMD dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah, tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan saham dan tidak mengelola PI pada wilayah kerja lain.

Pengalihan PI 10% dari kontraktor kepada BUMD atau perusahaan perseroan daerah wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas. Menteri ESDM memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan PI 10% dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender setelah dilakukannya pemeriksaan dan evaluasi persetujuan pengalihan. Sejak disetujuinya pengalihan PI 10%, pemegang saham BUMD atau perusahaan perseroan daerah dilarang



untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain dan/atau dilarang untuk mengalihkan *interest* yang dimilikinya kepada pihak lain.

Pengalihan PI 10% dari kontraktor ke BUMD merupakan pengalihan PI secara langsung. Pengalihan tersebut tidak dikenai pajak penghasilan (yang bersifat final) karena pada masa eksploitasi atas penghasilan dari pengalihan PI yang dimiliki secara langsung dilakukan untuk melaksanakan kewajiban sesuai kontrak kerjasama kepada perusahaan nasional. Hal itu sebagaimana tertuang dalam kontrak kerjasama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kegiatan usaha hulu migas dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021.



BUMD yang mendapatkan penawaran PI 10% harus memahami aspek perpajakan terkait PI tersebut. Aspek perpajakan dimaksud meliputi:

- Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   BUMD wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP ke kantor pelayanan pajak (KPP) berdasarkan tempat kedudukannya. Wajib pajak nantinya akan dipindahkan menjadi wajib pajak KPP Migas dengan penerbitan keputusan DJP sesuai Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-05/PJ/2021;
- Pemberitahuan Penggunaan Mata Uang Dolar Nilai *lifting* yang menjadi dasar penghitungan PPh Migas dalam mata uang dolar sehingga wajib pajak pemegang PI harus mengajukan pemberitahuan penggunaan mata uang dolar agar dapat menyetor dan melaporkan PPh Migas;
- Pelaporan Laporan Penerimaan Negara (LPN)
   Wajib pajak pemegang PI wajib melaporkan PPh Migas Corporate Income Tax (CIT) dan Branch Profit Tax (BPT) dalam LPN setiap bulan dan membuat LPN Tahunan yang menjadi lampiran pelaporan SPT Tahunan PPh;
- 4. Pelaporan Lampiran Khusus Wajib Pajak Migas dalam SPT Tahunan PPh Wajib pajak migas melaporkan SPT Tahunan PPh dengan melampirkan lampiran khusus wajib pajak migas Formulir 9A-1 sampai dengan 9A-7 untuk wajib pajak yang masih menggunakan mata uang rupiah dan 9B-1 sampai dengan 9B-7 bagi wajib pajak dengan mata uang dolar sebagaimana diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-05/PJ/2014.



Pengalihan PI kepada BUMD tidak otomatis memindahkan KPP tempat terdaftar perusahaan BUMD tersebut ke KPP Migas sebagai KPP yang mengadministrasikan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S), sehingga BUMD tersebut melaporkan kewajiban perpajakannya di KPP terdaftar sebelum dipindahkan administrasi pajaknya ke KPP Migas. Selain itu, BUMD pemilik PI tersebut bisa saja belum memiliki izin penggunaan mata uang dolar untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

BUMD pemilik PI yang belum memiliki izin penggunaan mata uang dolar dapat melakukan koordinasi dengan operator pemilik PI sebelumnya untuk melakukan pembayaran PI sejumlah bagian kewajiban BUMD dengan menggunakan NPWP operator. Jumlah pembayaran tersebut nantinya perlu dilakukan

pemindahbukuan ke NPWP BUMD pada saat izin penggunaan mata uang dolar sudah disetujui.

Kewajiban pembayaran dan pelaporan PPh Migas dari BUMD pemilik PI merupakan sumber penerimaan pajak pemerintah pusat. Meskipun demikian, penerapan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 ini juga memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, antara lain:

- 1. Pendapatan Daerah Keterlibatan daerah dalam industri migas melalui BUMD dapat meningkatkan pendapatan daerah dari bagi hasil kegiatan pertambangan migas.
- 2. Pembangunan Infrastruktur Pertambangan migas di suatu daerah, tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai,



misalnya ketersediaan jalan, jembatan, listrik, pusat pelayanan kesehatan dan sebagainya. Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut tentu saja memberi manfaat juga bagi masyarakat daerah.

- 3. Penciptaan Lapangan Kerja Kegiatan operasional BUMD migas dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik secara langsung di sektor migas maupun di sektor-sektor terkait, seperti konstruksi, transportasi, dan jasa.
- 4. Pengelolaan Lingkungan
  BUMD migas dapat berperan dalam
  pengelolaan lingkungan yang
  berkelanjutan dengan mematuhi
  regulasi lingkungan yang ketat
  dan menerapkan praktik-praktik
  ramah lingkungan dalam kegiatan
  operasional mereka.

Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki di suatu daerah, BUMD migas dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Keterlibatan BUMD dalam kegiatan industri hulu migas secara langsung melalui kepemilikan PI juga menjadi nilai tambah bagi BUMD untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai aspek bisnis, teknologi, ekonomi, dan fiskal di bidang pertambangan migas.

Penulis: Agus Wahyudi Editor: Ahmad Dahlan



Catatan Pencapaian Penerimaan PBB KPP Migas; 12% untuk 101%

Pengamanan penerimaan negara di Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) tidak hanya berfokus pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja, tetapi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, selain Pemeriksa Pajak dan Account Representative, KPP Migas juga diperkuat dengan tenaga Penilai Pajak yang andal untuk dapat merealisasikan seluruh target penerimaan pajak KPP Migas.



Penilai Pajak merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas pokok melakukan penilaian. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, termasuk analisis kewajaran usaha. Tugas tersebut membutuhkan kemampuan yang mumpuni agar penerimaan PBB khususnya di sektor pertambangan migas dan sektor lainnya di KPP Migas mendapatkan hasil yang optimal.

Kegiatan penilaian di KPP Migas terdiri dari penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB sektor pertambangan migas, PBB sektor lainnya, penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian aset tidak berwujud. Penilaian NJOP PBB berkontribusi sangat besar pada penerimaan pajak di KPP Migas. Pada tahun 2023, KPP Migas mendapatkan target penerimaan PBB sektor pertambangan migas sebesar Rp11,17

triliun dan PBB sektor lainnya sebesar Rp63,82 milyar. Bagaimana kisah sukses 3 punggawa Penilai Pajak di KPP Migas untuk memenuhi target penerimaan PBB tahun 2023?

#### PBB di KPP Minyak dan Gas Bumi

KPP Minyak dan Gas Bumi pada dasarnya memiliki keunikan tersendiri dalam mengadministrasikan PBB yang tidak dimiliki oleh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lain. Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, KPP Migas merupakan KPP tempat objek pajak terdaftar yang meliputi:

- Objek pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi untuk permukaan bumi offshore;
- Objek pajak PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi untuk tubuh bumi;
- Objek pajak PBB sektor lainnya untuk jaringan pipa, jaringan kabel, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan; dan/atau
- 4. Objek pajak PBB sektor lainnya untuk perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan, dalam hal wajib pajak tidak terdaftar pada KPP Pratama.

Penetapan NJOP PBB atas objek pajak tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/ PMK.03/2019 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB.

#### PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Keberhasilan Penilai Pajak dalam memenuhi target penerimaan PBB di KPP Migas merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya tentu saja dari wajib pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB, KPP Migas mengadakan kegiatan Edukasi Peraturan PBB dan Aplikasi Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak.

Pada tahun 2023, kegiatan edukasi PBB di KPP Migas diselenggarakan dalam 2 gelombang, yaitu pada tanggal 25 Januari 2023 untuk wajib pajak PBB sektor pertambangan migas dan 22 Februari 2023 untuk wajib pajak PBB sektor lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh sebagian besar wajib pajak PBB. Upaya edukasi tersebut membuahkan hasil dilihat dari antusias wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB, sehingga tidak heran bila penerimaan PBB KPP Migas dapat mencapai target yang ditentukan.

Selain dari sisi kepatuhan wajib pajak yang baik, ada pula dari sisi penilaian NJOP PBB. Perhitungan NJOP sangat menentukan besarnya PBB yang harus dibayar. Diperlukan ketelitian dalam menentukan dasar pengenaan PBB, sehingga hasilnya tepat dan akurat. Salah satu faktor yang menentukan besarnya NJOP PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi untuk tubuh bumi adalah hasil *lifting* minyak dan

gas bumi. Nilai *lifting* tersebut sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan Financial Quarterly Report (FQR) triwulan IV masing-masing wilayah kerja pertambangan migas pada tahun sebelumnya.

Kegiatan pertambangan migas di tahun 2022 memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan PBB sektor pertambangan migas tahun 2023.
Beberapa wajib pajak berhasil melampaui target *lifting* minyak dan gas bumi dari target APBN tahun 2022. Salah satunya, Saka Indonesia Pangkah Limited. Hingga 30 Desember 2022, *lifting* minyak wilayah kerja Pangkah mencapai 7.620 barel minyak per hari atau sebesar 143% dari target APBN 2022. Untuk *lifting* gas jumlahnya mencapai 50,51 juta kaki kubik per hari atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

Beberapa wajib pajak yang juga berkontribusi besar dalam pembayaran PBB sektor pertambangan migas Tahun Pajak 2023 antara lain, Exxonmobil Cepu Limited, Pertamina Hulu Rokan, Pertamina EP, BP Berau Ltd, dan Medco E&P (Grissik) Ltd. Hasil *lifting* Kontraktor



Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas tersebut memberi dampak yang signifikan bagi pemenuhan target penerimaan PBB sektor pertambangan migas baik subsektor tubuh bumi maupun permukaan bumi offshore.

Aspek eksternal lain yang berperan dalam realisasi nilai PBB di tahun 2023 adalah nilai kurs mata uang dollar Amerika Serikat terhadap rupiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/ PMK.03/2019 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan NJOP PBB, diatur bahwa dalam hal penjualan kotor menggunakan satuan mata uang selain mata uang rupiah, penjualan kotor harus dikonversi dalam satuan mata uang rupiah berdasarkan kurs mata uang pada tanggal 1 Januari Tahun Pajak PBB terutang. Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan nilai kurs pajak. Kurs dollar Amerika Serikat yang berlaku untuk perhitungan NJOP PBB tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp15.606,00, kurs ini mengalami lonjakan yang signifikan

dibanding kurs untuk perhitungan NJOP PBB tahun pajak 2022 yaitu sebesar Rp14.294,00 atau melonjak sebesar 9,18%.

Selain itu, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mengeluarkan pedoman baru dalam perhitungan nilai indikasi bangunan khusus yang telah dilakukan penyesuaian kenaikan harga bangunan. Melalui nota dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor ND-169/PJ/06/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Penyampaian Pedoman dalam Perhitungan Nilai Indikasi Bangunan, terdapat beberapa hal yang menjadi panduan untuk menentukan NJOP bangunan PBB Migas Tahun Pajak 2023 dan seterusnya yaitu:

- a. Mengacu nilai bangunan berdasarkan dokumen pendukung yang memadai.
- b. Menggunakan petunjuk teknis penilaian yang telah ditetapkan DJP.
- c. Khusus untuk bangunan PBB Sektor Migas dalam hal nilai bangunan dan petunjuk teknis belum tersedia, penentuan NJOP bangunan khusus mengacu pada nilai indikasi bangunan khusus yang telah dilakukan penyesuaian kenaikan harga





bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya metode survei kuantitas, antara lain:

- Sumur Offshore kedalaman < 1000 meter, Rp98.231.859.567 per unit sumur
- Sumur Offshore kedalaman > 1000 meter, Rp150.519.068.141 per unit sumur
- Anjungan lepas Pantai (Platform), bervariasi dari Rp164.952.774.492 s.d. Rp306.561.287.897 per unit platform berdasarkan kedalaman air laut dan luas platform
- Single Buoy Mooring, Rp9.699.271 per meter persegi
- Floating processing storage and offloading, Rp348.770.646 per meter persegi
- Floating storage and offloading, Rp121.255.351 per meter persegi
- Floating processing unit,
   Rpl.169.477.403 per meter persegi

Tentu saja pedoman-pedoman ini berdampak luar biasa pada pokok ketetapan PBB Tahun Pajak 2023 di KPP Migas.

#### **PBB Sektor Lain**

KPP Migas juga menjadi KPP tempat objek PBB terdaftar untuk sektor lainnya, yaitu objek PBB atas jaringan pipa, jaringan kabel, fasilitas penyimpanan dan pengolahan, dan perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan, dalam hal wajib pajak tidak terdaftar pada KPP Pratama. Selain melakukan penilaian NJOP PBB sektor pertambangan Migas, Penilai KPP Migas juga harus melakukan penilaian NJOP pada beberapa objek PBB sektor lainnya.

Pada tahun 2023, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-59/PJ/2023 tentang Penetapan Biaya Investasi Tanaman, Rasio Biaya Produksi, Angka Kapitalisasi, Nilai Jual Objek Pajak Bumi per Meter Persegi, Harga Uap Dan Harga Listrik, Dan luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal, Untuk penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan yang menaikkan NJOP tahun pajak 2023. Salah satu penetapan NJOP yang mempengaruhi nilai penerimaan PBB sektor lain di KPP Migas adalah NJOP untuk perairan yang digunakan untuk jaringan pipa, jaringan kabel, dan fasilitas penyimpanan dan pengolahan, yaitu sebesar Rp13.698 dari yang sebelumnya sebesar Rp11.450 per meter persegi.

KEP-59/PJ/2023 juga mengatur angka kapitalisasi untuk penetapan NJOP pada perairan yang digunakan untuk perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi ditetapkan sebesar 10,9 dari yang sebelumnya sebesar 10. Rasio biaya produksi untuk penentuan biaya produksi pada perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan juga berubah dari 70% menjadi 60%.

Ketentuan mengenai peningkatan angka kapitalisasi dan pengurangan rasio biaya produksi, secara matematis meningkatkan jumlah pendapatan bersih wajib pajak. Nilai pendapatan bersih tersebut menjadi dasar penilaian NJOP, sehingga nilai PBB terutang yang dihitung juga menjadi lebih besar.

#### Penilaian Harta Berwujud, Harta Tidak Berwujud, dan Bisnis

Tingginya beban penerimaan PBB yang diamanatkan pada KPP Migas, tentu saja membuat Penilai Pajak harus berkontribusi lebih. Penilai Pajak di KPP Migas tidak hanya ditugaskan untuk melakukan penilaian NJOP, tapi juga melakukan penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis yang merupakan lingkup penilaian untuk perpajakan. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan. Tugas tersebut didefinisikan sebagai penilaian non PBB untuk membantu proses pengawasan dan pemeriksaan pajak dari berbagai pihak yang membutuhkan.

Salah satu keunikan penilaian non PBB di KPP Migas yang tidak ada di unit DJP lain adalah penilaian Participating Interest.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift Atau Imbalan Lain Yang Sejenis Dan/Atau Penghasilan Kontraktor Dari Pengalihan Participating Interest, Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja

Penilaian atas Participating Interest merupakan salah satu prioritas dalam rencana kerja penilaian non PBB, karena terdapat potensi pajak berupa PPh Pasal 4 ayat 2 ketika terjadi pengalihan Pl antar entitas. Untuk menggali potensi pajak ini, Penilai Pajak bekerja sama dengan Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam proses pengumpulan data dan penggalian potensi pajak lainnya. Selain untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan pajak, Penilai Pajak juga diminta untuk menilai harga pasar dan harga likuidasi aset sita oleh Juru Sita Pajak.

Penilaian harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis sama pentingnya dengan penilaian NJOP PBB. Oleh karena itu, Penilai Pajak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak selama proses penilaian agar penggalian potensi pajak di KPP Migas dapat berjalan dengan baik.



Dengan usaha terbaik dan faktor pendukung lainnya, Penilai Pajak KPP Migas sukses mengumpulkan penerimaan PBB sektor pertambangan migas Tahun Pajak 2023 sebesar Rp12.672.422.185.177 atau 113,37% dari target yang ditetapkan dan penerimaan PBB sektor lainnya sebesar Rp90.097.663.993 atau 141,17% dari target. Secara keseluruhan, penerimaan PBB sebesar Rp12.762.519.849.170 berkontribusi lebih dari 12% terhadap total penerimaan KPP Migas.

KPP Migas berhasil menutup tahun 2023 dengan hasil yang menggembirakan. Penilai PBB KPP Migas membuktikan semangat kerja maksimal walaupun hanya berjumlah 3 orang. Hasilnya, tidak hanya berkontribusi untuk KPP Migas, penerimaan PBB yang diadministrasikan di KPP Migas juga mampu memenuhi sebagian target penerimaan PBB sektor P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya) nasional.

Penerimaan PBB KPP Migas tahun 2023 sebesar Rp12.762.519.849.170 juga menggambarkan telah terpenuhinya 47,16% target penerimaan PBB sektor P5L di seluruh Indonesia. Kegiatan edukasi yang konsisten, pengawasan dan pengadministrasian yang baik dalam proses penilaian, pelaporan dan pembayaran PBB, serta beberapa faktor pendukung lainnya menjadi kunci terpenuhinya target penerimaan PBB yang menjadi tanggung jawab KPP Migas.

Penulis: Angga Ardodika Editor: Ifta Ilfia Utami



## Pembukuan bagi Wajib Pajak KKKS

Contraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). KKKS merupakan subjek pajak yang terdaftar di KPP Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Paiak nomor PER-07/PJ/2020 io PER-05/ PJ/2021. KKKS ditetapkan sebagai wajib pajak KPP Migas melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang sudah terdaftar atau dengan mendaftarkan langsung ke KPP Migas untuk wajib pajak baru.

KKKS mempunyai kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan minyak bumi dan/ atau gas alam (PPh Migas) yang terdiri dari PPh Badan dan branch profit tax. Besarnya PPh Migas terutang dihitung berdasarkan penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil dikurangi biaya-biaya dikalikan tarif pajak penghasilan pada saat kontrak ditandatangani. Perhitungan ini dituangkan dalam Laporan Penerimaan Negara (LPN) setiap masa pajak. Pada akhir tahun, KKKS membuat LPN Final berdasarkan Financial Quarterly Report (FQR) Final sebagai acuan untuk mengisi Lampiran Khusus SPT Tahunan 9B-1 dan 9B-2 sesuai dengan PER-05/ PJ/2014.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.02/2012 jo PMK Nomor 70/PMK.03/2015, pembayaran PPh Migas dalam bentuk tunai dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Seperti wajib pajak pada umumnya, KKKS wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Berdasarkan Pasal 28 UU KUP, pembukuan atau pencatatan harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Namun, KKKS dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat dengan menyampaikan pemberitahuan.

Pemberitahuan tersebut diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2007 jo PMK Nomor 123/PMK.03/2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020. Ketentuan tersebut mengatur kriteria Wajib Pajak yang dapat menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pembukuan, tata cara pengajuan, syarat pengajuan, pencabutan izin, dan penerbitan kembali izin.

KKKS menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada KPP Migas secara elektronik melalui menu Layanan KSWP pada laman Direktorat Jenderal Pajak. KKKS harus mengetahui kapan pemberitahuan diajukan agar dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan. Pemberitahuan dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan:

- a. sejak tanggal pendiriannya bagi KKKS yang sejak pendiriannya telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat: atau
- b. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut dimulai bagi KKKS yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

KKKS harus melampirkan kelengkapan persyaratan berupa pernyataan dan Surat Keterangan Fiskal pada saat mengajukan pemberitahuan. Pernyataan dibuat oleh pimpinan tertinggi KKKS atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam pernyataan tersebut, KKKS menyatakan bahwa pembukuan akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang Dolar Amerika Serikat. Selain pernyataan, KKKS harus memiliki Surat Keterangan Fiskal yang masih berlaku pada saat pemberitahuan disampaikan.

Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas pemberitahuan tersebut. Jika memenuhi persyaratan, sistem akan menerbitkan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi, terbit notifikasi tidak memenuhi persyaratan. Nomor administrasi pemberitahuan atau notifikasi penolakan akan terbit secara

otomatis segera setelah pemberitahuan disampaikan.

KKKS yang telah mendapatkan nomor administrasi pemberitahuan wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tersebut dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) Tahun Pajak sejak nomor administrasi pemberitahuan diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah, terhadap Wajib Pajak tersebut dicabut nomor administrasi pemberitahuan secara jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil Jaksus). Kepala Kanwil Jaksus akan menyampaikan pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dicabut nomor administrasi pemberitahuan tidak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Demikian pula, jika KKKS merencanakan untuk tidak memanfaatkan izin yang dimilikinya, wajib menyampaikan pemberitahuan tidak memanfaatkan izin dalam hal Tahun Pajak yang tercantum dalam nomor administrasi pemberitahuan atau keputusan dimaksud belum dimulai. Pemberitahuan tidak memanfaatkan izin disampaikan kepada Kepala Kanwil Jaksus secara elektronik. Berdasarkan pemberitahuan, sistem Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan pemberitahuan pencabutan nomor administrasi pemberitahuan.

Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat merupakan salah satu kewajiban bagi KKKS. Dengan ini, KKKS dapat melakukan pembayaran dan pelaporan PPh Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis: Agus Wahyudi Editor: Aditya Pradana Putra





## Desti Melanti, Srikandi Penjaga Migas Indonesia

Dalam hidup, kita seringkali tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia bertindak kepada kita, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas respon kita terhadap situasi yang terjadi di sekeliling kita. Salah satunya adalah saat kita dihadapkan pada perilaku bullying. Peristiwa bullying bisa saja terjadi di sekolah, rumah, tempat kerja, masyarakat, sampai dunia maya.

Bullying merupakan salah satu bentuk mental abuse yang bisa merusak mental seseorang. Beberapa orang mungkin merasa hancur dan depresi karena dibully, tetapi untuk sebagian orang, seperti tokoh kita, bullying justru dijadikan motivasi untuk tumbuh dan berkembang. la memiliki pengalaman pahit dengan bullying saat masih kecil dan hal itu sempat membuatnya merasa terpuruk. Namun, alih-alih menyerah, ia memilih untuk mengubah keadaan. Ia bertekad untuk terus mengasah kelebihan yang ia miliki dan menjadikan rasa sakitnya sebagai pengingat untuk dapat meraih kesuksesan. Ia adalah Desti Melanti, Kepala Divisi Akuntansi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Cantik, mandiri, tegas adalah kesan yang penulis rasakan ketika pertama kali bertemu Desti Melanti. Melihat penampilannya saat ini, orang tak akan menyangka bahwa wanita kelahiran Purwokerto tahun 1972 ini pernah menjadi korban bullying di sekolah. "Jika boleh flashback, ada masa saya itu tidak dipandang karena memang memiliki fisik

yang kurus, kecil, item lagi. Saat di Sekolah Dasar saya dulu sering digodain, diejek karena postur tubuh saya kecil, pernah ketika olahraga kaki diselengkat sampai jatuh," ungkapnya.

Bingung mau ngomong dengan siapa, tak jarang untuk mengungkapkan kekesalannya ia berbicara dengan cermin. Suatu ketika orang tuanya melihat ia sedang berbicara sendiri di depan cermin. Ayahnya langsung bertanya, "Kamu kenapa, dek?" Sambil menangis ia menceritakan bahwa sering diremehkan oleh teman-temannya karena memiliki postur tubuh yang kecil. Ayah kemudian menasehati saya jika kamu merasa kecil, kamu harus mengeluarkan kekuatan kamu. Sekarang kamu bisanya apa?. Ayah selalu bilang, "Jika kamu disakiti, kamu harus lawan. Kalau kamu merasa benar kamu harus perjuangkan, selama kamu jujur dan tidak merugikan orang lain. Itu pesan orang tua yang selalu saya ingat. Jadi jangan heran saya menjadi berkepribadian tegas seperti sekarang ini," tuturnya.

Sosok yang pantang menyerah ini memiliki prinsip "Jangan membatasi diri dengan kekurangan yang kamu miliki. Kekurangan yang kamu miliki harus menjadi kekuatan kamu di masa depan." Mulai di kelas 2 Sekolah Dasar, ia bertekad untuk menjadi juara kelas. "Saya harus bisa jadi juara kelas, karena itulah modal saya," ujarnya menambahkan.





Kekuatan terbesar kita adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa.



Meski secara ekonomi saat itu berkecukupan, Ayahnya tidak pernah memberikan sesuatu yang berlebih dan memanjakan anaknya. Untuk mendapatkan sesuatu harus ada perjuangan dan usaha. "Misal jika kita pengen beli sepatu baru, kita ditanya emang sepatu ini udah jelek? Kenapa harus beli sepatu baru? Oleh karena itu saya jarang meminta sesuatu kepada orang tua. Saya jadi sering mengikuti lomba untuk mendapatkan hadiah/uang tambahan buat jajan," ujarnya.

#### "Tidak ada yang salah dengan pilihan orang tua"

"Saya tak pernah pernah bercita-cita menjadi seorang Akuntan," ungkap Desti saat kami temui di kantornya pada Senin (21/04). Karena lebih suka menggambar, dahulu Desti memilih melanjutkan kuliah di jurusan Seni Rupa Institut Teknologi Bandung (ITB). la bercita-cita menjadi seorang konsultan desainer interior. la sebenarnya sudah diterima melalui jalur mandiri di ITB, sayang orang tua melarangnya. Saat itu bagi orang tuanya, jurusan Seni Rupa mungkin bukan menjadi pilihan yang menjanjikan karir. "Saya sampai nangis tiga hari karena kesal tidak diizinkan kuliah disana," kenang Desti.

Mengikuti pilihan orang tua, Desti akhirnya mendaftarkan diri di Universitas Trisakti jurusan Akuntansi. Walaupun sempat demotivasi di awal perkuliahan, Desti akhirnya bisa lulus tepat waktu dengan IPK yang baik. Ia pun bingung kenapa bisa lulus tepat waktu, padahal ia tidak terlalu suka akuntansi. Untuk meyakinkan bahwa Pendidikan yang ditempuh merupakan jalan yang tepat dalam mendukung karirnya di masa depan, Desti berinisiatif untuk melakukan konseling dengan psikolog.

"Hasil asesmen dengan psikolog menggambarkan bahwa memang tidak ada yang *match* antara *background*, *behavior*, dan *passion* yang dimiliki. Namun, sifat karakter persisten yang dimiliki itu menjadi kekuatan dan sifat perfect serta pantang menyerah itulah yang membuatnya bisa bertahan. Ia memiliki komitmen dan tanggung jawab yang kuat terhadap apa yang dilakukan saat ini. Walaupun bukan pilihan kita, mungkin pilihan orang tua adalah doa," ingat Desti.

Sebelum bekerja di SKK Migas, Desti Melanti telah malang melintang di perusahaan industri hulu migas. Selepas Iulus kuliah di Trisakti, dengan motivasi mendapatkan gaji yang besar, tahun 1996 ia memulai karir di industri migas dengan bergabung sebagai staf bagian aset di Atlantic Richfield Company (ARCO Indonesia). ARCO adalah perusahaan minyak independen Amerika yang beroperasi di Amerika Serikat, Indonesia, Laut Utara, Laut Cina Selatan, dan Meksiko. Pekerjaannya saat itu mengharuskan ia untuk bertugas ke lapangan offshore ARCO setiap bulan. "Dahulu masih muda oke saja, pakai jaket pelampung, terombang-ambing di kapal kemudian merapat ke platform melakukan pengecekan. Itulah yang sering saya lakukan 28 tahun yang lalu, jika sekarang seperti itu lagi, saya berpikir dua kali," ujarnya sambil tertawa.

Nasib baik menghampiri, 2 tahun berselang Desti promosi menjadi supervisor Property, Plant, & Equipment. Dari situlah ia mulai mengelola tim kerja dan banyak mempelajari softskill. Alumni SMA 1 Cirebon ini mengungkapkan ilmu yang paling cepat membentuk karakter kita adalah ilmu yang sifatnya non akademis. "Belajar tidak hanya melalui pendidikan formal namun bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di bidangnya, mencari pengalaman langsung di project, ikut training, membaca buku-buku human capital dan managing time, dari situlah kita banyak menemukan ilmu dan menjadikan kita lebih humble," ungkapnya.

Tahun 1999 terjadi peralihan ARCO Indonesia yang diakuisisi oleh British Petroleum (BP). Dalam kondisi ketidakpastian Desti memutuskan tetap melanjutkan bekerja bersama BP meskipun saat itu ada tawaran golden shakehand. Setelah melewati masa transisi pada tahun 2003, ia mendapatkan kepercayaan menjadi Senior Financial Analyst, BP Indonesia. Pada jabatan itu ia bertugas memberikan laporan kepada senior manajemen mengenai kinerja keuangan, termasuk analisis varians dan saran tentang potensi penghematan biaya.

Pada Januari 2004, Ibu dua putri ini mendapatkan promosi menjadi Head of Treasury, General Accounting and System Support, BP Indonesia. Sebagai wanita ia merasa sangat bersyukur memiliki suami dan keluarga yang sangat baik dalam mendukung karirnya. "Bohong kalau istri bisa berhasil tanpa dukungan suami, ridha suami paling penting, itu yang membuat kita bekerja nyaman," ujarnya.

Hampir 4 tahun menjadi Head of Treasury, General Accounting and System Support di BP Indonesia, Desti kemudian mendapat terdapat tawaran bergabung di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMigas). Sempat bimbang, atas support suami dan keluarga, serta mohon petunjuk melalui doa, ia akhirnya bergabung dengan BP Migas. Mengawali posisi sebagai Senior PSC Analyst di BPMigas, Desti sempat kaget ketika mengetahui penghasilan yang ia terima 30% dari penghasilan yang diterima di tempat kerja sebelumnya. Namun, ia meyakini pilihannya bergabung dengan BPMigas sudah tepat, karena ia bisa berkontribusi lebih besar kepada negara.

Sempat menjabat sebagai Manager of PSC Reporting BPMigas, tahun 2012 Desti mendapat promosi menjadi Senior Manager of General Accounting, sebelum akhirnya dilantik sebagai Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas sejak 2017 sampai saat ini. SKK Migas merupakan Satuan Kerja Khusus pengelola kegiatan hulu migas sebagai pengganti BPMigas yang dibubarkan pada tahun 2012. Selama menjadi bagian SKK Migas, beberapa penghargaan berhasil ia peroleh. Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan langsung penghargaan Dharma Karya ESDM Muda di sela Upacara Peringatan Hari Pertambangan 2021. Desti mendapat penghargaan atas keberhasilannya dalam menentukan strategi untuk menghadapi tantangan hulu migas melalui "Perbaikan Tata Kelola dan Rumusan Pemberian Stimulus" dalam rangka mendukung target LTP hulu migas 1 juta BOPD dan 12 BCFD di Tahun 2030 serta capaian optimalisasi penerimaan negara dan pengendalian cost recovery Tahun 2020-2021.

Selama 28 tahun lebih berkecimpung di sektor migas, Desti memiliki pandangan meski dunia migas dari segi jumlah lebih didominasi pria namun kiprah wanita tidaklah kalah. Ada hal-hal positif yang sebelumnya tidak terpikirkan, justru datangnya dari ide wanita. Hal ini tidak lepas dari karakteristik wanita yang terbiasa berpikir multitasking, creative thinking, melakukan hal yang detail dan kehati-hatian. "Mungkin itu beberapa advantage pekerja wanita yang tidak ada di pekerja pria," ungkapnya. Desti menambahkan untuk para wanita yang sedang dilema memilih antara karir atau keluarga, harus menentukan karir sesuai *passion* karena hal itu akan mempengaruhi jalan ke depannya. Jika memang ingin berkarir, maka harus "komit" melakukan itu dan jadilah orang yang bukan biasa-biasa saja.

Sebelum menutup pembicaraan, untuk mengembangkan kompetensi dan kapabilitas pegawai guna meningkatkan kinerja SDM dan organisasi, Desti menyarankan DJP khususnya KPP Minyak dan Gas Bumi untuk menjajaki dilakukannya kerjasama cross posting pegawai. Cross posting pegawai ini maksudnya menempatkan sementara pegawai yang potensial/talent untuk bekerja di stakeholder seperti SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (K3S),



bahkan di perusahaan jasa penunjang migas. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pegawai untuk mendapatkan pengalaman secara langsung melaksanakan proses bisnis yang sesungguhnya di lapangan terkait hulu migas. Apalagi industri jasa penunjang migas, saat ini menjadi industri strategis lokomotif penggerak yang menopang hulu migas. "Beri kesempatan pegawai KPP Migas untuk bekerja di oil company, di SKK Migas, itu telah kami lakukan, pegawai DJKN sudah ada yang bekerja di SKK Migas," pungkasnya.

Penulis: I Made Pandu Widiyatmika Editor: Tobagus Manshor Makmun Foto: Dokumentasi KPP Migas



## Women Empowerment:

Peran Para Wanita Indonesia di Industri Pertambangan Migas



Jejak perempuan sebenarnya telah banyak terukir dalam sejarah panjang Indonesia-sejak nusantara masih berbentuk kerajaan-kerajaan hingga era setelah Indonesia merdeka. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Ratu Shima dari Kerajaan Kalingga dan Keumalahayati dari Kerajaan Aceh, misalnya. Namun, dalam hal memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama pendidikan dan kesetaraan gender, Raden Ajeng Kartini adalah tokoh utama. Ia merupakan pelopor yang meletakkan dasar bagi kemajuan hak-hak perempuan pada masanya.

Pada era itu, tantangan yang dihadapi oleh perempuan indonesia tentunya berbeda dengan saat ini. Dahulu, akses perempuan pribumi untuk sekadar mendapatkan pendidikan dasar saja sangat terbatas. Hanya kalangan tertentu yang mempunyai kesempatan itu.

Estafet perjuangan emansipasi wanita yang digagas oleh RA Kartini terus bergulir. Pada tahun 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia. Pertemuan yang diadakan di pendopo Dalem Jayadipuran, Yogyakarta itu dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera. Kongres tersebut membahas masalahmasalah yang dihadapi oleh perempuan dan merumuskan strategi perjuangan untuk memperoleh hak-hak yang lebih baik. Peristiwa ini menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia yang menginspirasi banyak perempuan untuk terus berjuang demi kesetaraan dan keadilan.

Inisiatif para perempuan dari masa ke masa untuk berkumpul, berdiskusi, dan merumuskan strategi bersama telah membuka jalan bagi banyak kemajuan yang dinikmati oleh perempuan Indonesia masa kini. Berkat perjuangan mereka, perempuan Indonesia kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Saat ini, perempuan Indonesia bisa

menempati posisi-posisi penting dan strategis, bahkan di bidang-bidang yang dahulu identik dengan dunia lelaki, misalnya industri pertambangan minyak dan gas bumi.

Perempuan Indonesia mampu menjadi srikandi yang turut mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik dari sisi manajerial maupun teknis di lapangan. Sebut saja beberapa tokoh wanita berikut ini:

- Florentina Hatmi, Senior Vice President ExxonMobil Cepu Limited sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini:
- 2. Diah Kurniawati, Direktur Keuangan PT Pertamina International Shipping;
- 3. Listiani Dewi, Senior Manager Supply Change Management Husky-CNOOC Madura Limited;
- Widyastuti, Team Manager
   Operational Tax PT Pertamina Hulu
   Rokan

Dengan semangat RA Kartini, dalam rubrik khusus Migazine kali ini, kami dengan bangga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh perempuan Indonesia, khususnya yang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi di Indonesia.

Teruslah bersinar, bermanfaat, dan berbahagia wahai perempuan Indonesia kebanggaan Ibu Pertiwi.

Penulis : Ifta Ilfia Utami

Editor: Tobagus Manshor Makmun





: Master of Science in Finance, Boston College, Massa-Pendidikan Terakhir

chusetts, USA

Hobi : Merajut

: 2020 - Sekarang - Direktur Keuangan PT Pertamina Riwayat Karir

International Shipping

Tokoh Inspiratif : Ibu Nicke Widyawati - Direktur Utama PT Pertamina

(Persero)

: Start with big goals, imagine it, work hard, and make Kalimat Inspiratif

it happen



Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum

Hobi : Olahraga (berkuda, tennis, *diving*, *jogging*),

memainkan alat musik saxophone, ukulele,

harmonica, melukis

Riwayat Karir : Husky-CNOOC Madura Limited (Sr. Manager Supply

Change Management)

Tokoh Inspiratif : Walt Disney

Kalimat Inspiratif : Be Unique, Be Different, Be You! Kamu lebih indah,

lebih kuat, lebih baik dari yang kamu pikir, karena

Tuhan menciptakanmu dengan segala kasih

sayangnya dan dilahirkan ke dunia karena suatu alasan



# Empowering the Energy of Diversity



**Town Hall Meeting KPP Migas 2024** 

Emang Boleh Sekeren ini?

elasa, 6 Februari 2024, KPP
Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas)
menyelenggarakan kegiatan Town
Hall Meeting. Sebuah acara formal yang
dikemas dengan penuh kreatifitas. Acara
yang dihadiri oleh seluruh pegawai KPP
Migas itu digelar di Aula Lantai 2 Gedung
Radjiman Wedyodiningrat, Jakarta.
Pimpinan KPP Migas juga mengundang
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta
Khusus beserta jajarannya untuk hadir di
acara ini.

Sejak pagi aula lantai 2 Gedung Radjiman Wedyodiningrat terlihat ramai. Beberapa panitia yang merupakan pegawai KPP Migas sudah hadir untuk mempersiapkan acara spesial di hari itu. Para kru mempersiapkan perlengkapan seperti sound system, videotron, tata lampu dan dekorasi aula. Beberapa orang juga terlihat sibuk melakukan gladi resik, sebelum acara dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Tidak hanya di dalam aula, panitia juga membuat dekorasi yang sangat unik di bagian depan aula. Di pintu masuk aula terdapat sebuah gapura keren yang bertuliskan nama dan tema acara. Terdapat foto booth di sisi kanan pintu masuk aula. Beberapa rangkaian papan display informasi dan foto-foto kegiatan KPP Migas dipajang di sisi kiri koridor tempat masuk aula.

Di depan foto booth, ada sebuah media berbentuk kubus yang pada keempat sisinya dipasangkan screen berukuran kurang lebih 50 inch untuk menayangkan foto pegawai KPP Migas dengan quotenya masing-masing secara bergantian. Terlihat quote berupa komitmen, harapan, hingga motivasi untuk mencapai target utama KPP Migas, yaitu quattrick pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024.





Ardiyanto Basuki yang kala itu menjabat sebagai Kepala KPP Migas memprakarsai terlaksananya Town Hall Meeting KPP Migas Tahun 2024. Beliau berpesan, agar acara dibuat semenarik mungkin, sehingga semua peserta dapat bergembira dan menikmati acaranya.

Town Hall Meeting KPP Migas Tahun 2024 mengusung tema Empowering the Energy of Diversity. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ajang komunikasi dan koordinasi rencana kerja KPP Migas untuk menyukseskan quattrick penerimaan 100% dan pelaksanaan coretax Tahun 2024. Sesuai temanya, acara tersebut dikemas dengan nuansa keragaman budaya Indonesia.

Tema Empowering the Energy of Diversity dipilih untuk menggambarkan sebaran wilayah kerja pertambangan migas di Indonesia yang menjadi penyokong ketersediaan energi dan penerimaan negara. Acara ini dikemas secara kreatif sebagai buah karya dan pikiran pegawai KPP Migas agar dapat mengenal dan

lebih menghargai keragaman budaya dan bentuk perbedaan lainnya sebagai sumber kekuatan negeri.

Sebagai salah satu perwujudan semangat Empowering the Energy of Diversity, dalam acara ini para pegawai memakai berbagai baju adat di Indonesia. Pakaian yang dikenakan mewakili pakaian adat dari daerah-daerah penghasil sumber daya minyak bumi dan gas alam, seperti pakaian adat Aceh, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Jawa, Sumatera Utara, dan daerah lainnya.

Tidak hanya pakaian adat, pertunjukan tari tradisional juga digelar. Sebagai pembuka, Grup Migas Dancer menyambut kehadiran Kepala KPP Migas, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan para tamu undangan dengan iringan Tari Mappadendang yang dibawakan dengan ciamik dan meriah.

Tari Mappadendang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tarian





tersebut menceritakan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Tarian ini juga sebagai simbol rasa syukur atas limpahan karunia dari sang maha kuasa. Seperti halnya pencapaian KPP Migas dan Kanwil DJP Jakarta Khusus di tahun 2023 yang merupakan hasil dari kerja sama yang wajib disyukuri.

### Koordinasi KPP Migas dan Kanwil DJP Jakarta Khusus

Town Hall Meeting KPP Migas memberikan ruang dan waktu bagi Pimpinan KPP Migas untuk mengkomunikasikan *goal* yang ingin dicapai, rencana kerja, dan inovasi di tahun 2024. Dalam sambutannya Kepala KPP Migas menyampaikan strategi KPP Migas dalam merealisasikan target penerimaan sebesar Rp110,62 triliun, salah satunya dengan melakukan *refocusing* tugas dan fungsi.

Pimpinan KPP Migas mempunyai rencana strategis lebih lanjut melalui *learning* 

& growth perspective, internal process perspective, customer perspective, dan stakeholder perspective. Empat komponen tersebut memiliki peran penting bagi terwujudnya tujuan organisasi melalui sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang berkinerja tinggi dengan penerapan manajemen risiko yang efektif dan berintegritas, kepatuhan sukarela wajib pajak yang meningkat, dan pemenuhan hak dan kewajiban para stakeholder.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Irawan, menyambut baik terselenggaranya kegiatan Town Hall Meeting KPP Migas. Beliau merasa bangga, KPP Migas dapat membuat acara semeriah ini. Town Hall Meeting dapat membangun sinergi yang baik antar pegawai di KPP Migas juga dengan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Irawan berharap KPP Migas dan seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dapat berhasil memenuhi target yang diamanahkan, dengan tetap menjaga integritas.

#### Strategi KPP Migas di Tahun 2024

Dalam acara Town Hall Meeting KPP Migas, seluruh Kepala Seksi, Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Koordinator Fungsional Penyuluh Pajak dan Koordinator Fungsional Penilai Pajak KPP Migas mempresentasikan gagasan mereka untuk mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2024. Berbagai strategi dan inovasi dicanangkan untuk mendukung kinerja KPP Migas yang optimal.

Kepala Seksi Penjamin Kualitas
Data (PKD) KPP Migas memberikan
overview dan action plan tahun 2024.
Di antaranya adalah komitmen untuk
mempertahankan capaian IKU kegiatan
penerimaan pajak yang akurat tahun
2024 dengan cara menganalisis dan
memetakan potensi pajak atas industri
migas nasional. Hasil pengolahan
data yang baik dapat memprediksi
capaian atau resiko yang dialami dalam
pengambilan sebuah keputusan.

Tim dari Seksi PKD KPP Migas akan melakukan pengolahan dan penyajian data informasi perpajakan dengan penghimpunan data dari para stakeholder di luar data yang tersedia. Seksi PKD juga berupaya untuk meningkatkan kualitas atas analisis data yang diproduksi sehingga data dapat langsung dimanfaatkan oleh pengguna. Data tersebut dapat menjadi kunci penyusunan prognosa untuk melakukan estimasi penerimaan pajak tahun 2024.

KPP Migas mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam pengamanan penerimaan negara. Pada tahun 2024 Kepala KPP Migas mengelompokkan Seksi Pengawasan sesuai fokus kluster wajib pajaknya (refocusing). Pengelompokan tersebut terdiri dari wajib pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) skema bagi hasil Cost Recovery, wajib pajak Geothermal & PBB Migas, K3S skema bagi hasil Gross Split, wajib pajak Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO), dan kluster wajib pajak Jasa Penunjang.





Setiap Kepala Seksi Pengawasan dan Ketua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak yang menjadi tandemnya, memaparkan rencana kerjanya dengan lebih detail sesuai dengan *refocusing* fungsi pengawasan dan pemeriksaannya masing-masing.

Kepatuhan penyampaian SPT,
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
dan Pengawasan Kepatuhan Material
(PKM) menjadi action plan tahun 2024
pada Seksi Pengawasan. PPM menjadi
kegiatan pengawasan terhadap wajib
pajak atas perilaku pelaporan dan
pembayaran masa yang dikaitkan dengan
aktivitas ekonomi pada tahun pajak
berjalan.

Sementara itu, PKM merupakan pengujian kepatuhan melalui penelitian yang komprehensif. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Pada kesempatan berikutnya, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) menyampaikan action plan tahun 2024. Dari sisi pemeriksaan, dibentuk tim compliance risk management dan pairing partner untuk melakukan monitoring dan evaluasi progres pemeriksaan dengan aplikasi yang telah terintegrasi, peningkatan kompetensi pemeriksa dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.

Adapun rencana kerja di bidang penagihan adalah dengan melakukan pengamanan PKM dan penagihan, pengawasan tunggakan rutin dan komitmen angsuran, asset tracing dan clustering dan focusing. Untuk meningkatkan kualitas penilaian, Kepala Seksi P3 menyampaikan usulan perbaikan regulasi kepada direktorat teknis terkait kondisi yang ditemui dilapangan.



Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan dan edukasi yang lebih baik kepada wajib pajak. Dalam paparannya, Kepala Seksi Pelayanan dan Koordinator Penyuluh Pajak KPP Migas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak.

Seksi Pelayanan dan Penyuluh Pajak KPP Migas berkomitmen untuk menjaga hasil survei kepuasan pelayanan dan edukasi agar melampaui target IKU yang ditentukan. Peningkatan pelayanan prima perlu dilakukan dengan memberikan layanan terbaik berupa kemudahan, kecepatan, kesesuaian layanan, meningkatkan kemampuan petugas serta sarana dan prasarana yang memadai

Dalam hal edukasi kepada wajib pajak, Koordinator Penyuluh Pajak akan berfokus pada edukasi mengenai program reformasi perpajakan yaitu Coretax. Penyuluh Pajak juga berkomitmen untuk berperan dalam edukasi yang menghasilkan perubahan perilaku wajib pajak yang dapat berdampak langsung terhadap upaya pengamanan penerimaan pajak KPP Migas.

Pemaparan program kerja, strategi dan inovasi dari setiap Kepala Seksi pada acara Town Hall Meeting ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik lagi di antara seluruh unit di KPP Migas. Kolaborasi dan kerja sama dari setiap bagian dapat meningkatkan kualitas tugas dan fungsi masing-masing dalam bekerja.

#### **Semarak Town Hall Meeting KPP Migas**

Town Hall Meeting KPP Migas 2024 sekaligus menjadi acara perpisahan pegawai yang telah berpindah ke tempat tugas yang baru pada periode awal Januari 2024. Pemutaran video yang bercerita tentang teman-teman yang pernah bekerja di KPP Miga memberikan kesan tersendiri, lucu, haru, dan penuh sukacita.

Kepala KPP Migas memberikan apresiasi kepada alumni KPP Migas yang hadir dalam acara ini. "Semoga sukses di tempat yang baru, diberikan kesehatan, dan kemudahan," ungkap Kepala Kantor KPP Migas saat itu, dalam sambutan untuk melepas pegawainya. Dalam kesempatan tersebut diserahkan cinderamata sebagai kado perpisahan dan foto bersama.

Di penghujung acara, alunan berbagai lagu tradisional, *medley* tarian dari sejumlah daerah di Indonesia ditampilkan oleh Gaspoline Band dan Migas Dancer. Pertunjukan musik dan tari itu berhasil memukau seluruh penonton. Tidak hanya itu, antusiasme pegawai KPP Migas dan tamu undangan semakin terasa saat diminta untuk memainkan alat musik angklung bersama-sama dengan membawakan lagu gundul-gundul pacul. sebuah momen yang juga menandakan kekompakan dan kebersamaan.

Pemukulan gong oleh Ardiyanto Basuki, menandakan berakhirnya acara Town Hall Meeting KPP Migas tahun 2024. Prosesi tersebut juga menjadi lambang diresmikannya kick off action plan KPP Migas tahun 2024. Beliau berharap Town Hall Meeting ini akan menjadi agenda rutin KPP Migas sebagai salah satu forum kebersamaan untuk mengomunikasikan informasi perkembangan KPP Migas dan sarana penyampaian pendapat dari pegawai kepada pimpinan.

Panulis: Anik Mailani Editor: Ifta Ilfia Utami









# Tärhih Rämadhän 1445 H

Bersama Ustadz Muhammad Nur Maulana, M.Ag.



"Ramadhan Sebagai Momentum Muhasabah dan Peningkatan Ibadah"



# Kartini











# Ketika Kesepian Menjadi Musuh Terbesar di Hari Tua

Judul Film: How to Make Millions Before Grandma Dies

Sutradara: Pat Boonnitipat

Durasi: 127 menit

Tanggal rilis: 15 Mei 2024

Pemeran: Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tontawan Tantivejakul, Sa-

rinrat Thomas, Sanya Kunakorn, Pongsatorn Jongwilas, Himawari Tajiri

wal 2024, film bergenre horor, action, dan komedi mendominasi box office Indonesia. Namun, ada satu film bergenre drama dari Thailand berjudul How to Make Millions Before Grandma Dies ikut bersaing. Film berjudul asli Lahn Mah ini disutradarai Pat Boonnitipat yang telah sukses membuat serial Bad Genius (2020). Tentu saja ini merupakan prestasi tersendiri bagi sineas Thailand bisa bersaing dengan film Hollywood. Film ini ramai diperbincangkan di media sosial. Kisah haru yang diceritakan sukses membuat para penonton banjir air mata.

#### **Sinopsis**

Film ini menceritakan seorang nenek Tionghoa, Amah (Usha Seamkhum) yang memiliki tiga orang anak, yaitu Kiang (Sanya Kunakorn), Sew (Sarinrat Thomas), dan Soei (Pongsatorn Jongwilas). Kiang, si anak sulung berprofesi sebagai pialang saham sukses yang memiliki anak balita bernama Rainbow (Himawari Tajiri). Sew, si anak perempuan merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai karyawan di pasar swalayan. Sew memiliki seorang anak bernama M (Putthipong Assaratanakul) dengan profesi streamer game. Terakhir, Soei, si anak bungsu yang pengangguran dan banyak hutang.

Amah tinggal sendiri di sebuah rumah tua sederhana khas orang Tionghoa sedangkan anak-anaknya sudah memiliki tempat tinggal masing-masing.

M berhenti dari pekerjaannya untuk merawat Amah yang sedang sekarat karena termotivasi oleh warisan Amah. M berencana untuk memenangkan hatinya sebelum Amah meninggal. Tidak hanya M, Kiang, Sew, dan Soei juga mengincar warisan tersebut.

#### **Alur Cerita**

Amah melakukan perjalanan dengan ketiga anak dan cucunya, M ke area pemakaman mewah. Satu makam seharga satu juta baht. Amah kerap kali mengungkapkan obsesinya. Jika meninggal dunia, dia ingin dimakamkan di area tersebut. Dalam kepercayaan Tionghoa, jika orang tua dimakamkan di tempat yang mewah, anak-anaknya akan menikmati kemakmuran.

Saat berjalan sambil menabur bunga di sebuah gundukan makam, Amah terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa Amah menderita kanker usus stadium empat dengan harapan hidup sekitar satu tahun lagi.



Melihat kondisi Amah, M berniat mendekati Amah demi mendapat warisan. M memutuskan berhenti menjadi streamer game dan tinggal di rumah Amah untuk merawat serta mengambil hatinya. M melakukan segala cara untuk menunjukkan perhatiannya, seperti rela mengantri panjang demi membeli ikan goreng kesukaan Amah, menyiapkan air hangat untuk mandi, menemaninya main kartu, hingga menjaganya saat tidur. Di pagi hari, M membantu membuat congee (semacam bubur) dan mengantar Amah ke pasar untuk berjualan. Dari sana, M baru tahu bahwa hasil penjualan congee sebagian ditabung, sebagian disimpan di sebuah kaleng biskuit.

Saat semua terlihat baik-baik saja, terjadi serangkaian peristiwa yang mengguncang Amah.

Suatu saat Amah mendapati uang

> kaleng biskuitnya hilang. Dua ratus ribu baht untuk pembelian tanah makam sirna. Setelah melihat CCTV, ternyata uang

itu diambil oleh Soei untuk membayar hutang. Belum reda kesedihan Amah, datanglah seorang laki-laki yang berniat membeli rumah setelah melihat iklan yang dibuat M di media sosial. Amah sedih mengetahui anak dan cucunya ternyata tidak tulus merawatnya.

Waktu berlalu. Amah sakit keras dan dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan kankernya sudah semakin parah dan menyarankan untuk pulang agar dapat menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga.

Family is calling

Foto: imdb.com

MAKE

MILLIONS

before

GRANDMA

DIES

15 MEI DI BIOSKOP

Melihat umur Amah yang sudah tidak lama lagi, Sew membuka surat warisan yang sebelumnya telah dibuat Amah. Ternyata Amah mewariskan rumah tersebut kepada Soei. Keputusan ini mengecewakan Kiang dan M. Bahkan M sampai lepas kendali memarahi Amah yang tidak mewariskan rumah tersebut kepadanya.

Setelah pulang dari rumah sakit, Soei yang mendapat warisan rumah mempunyai kewajiban merawat Amah. Alih-alih dirawat, Amah dimasukkan ke panti jompo. Rumah warisan tersebut pun dijual.

Film drama keluarga sering kali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terutama di Asia, tradisi keluarga masih dipegang teguh. Dalam film ini,

dipegang teguh. Dalam film ini, terdapat beberapa scene yang membuat penonton tertegun sedih, seperti saat Amah dengan pakaian terbaiknya duduk di kursi depan rumah setiap minggu pagi. Kebiasan itu selalu dilakukan saat menunggu kedatangan anak cucunya berkunjung. Namun, mereka sering kali tidak datang.

Amah juga bercerita kepada M bahwa waktu terindah adalah saat hari raya Imlek. Pada momen itu, semua anak dan cucunya berkumpul dan makan bersama. Sebaliknya, saat paling menyedihkan adalah ketika hari raya Imlek berakhir. Ada banyak makanan, tapi Amah sendiri yang menghabiskan.

Dari film ini, kita belajar bahwa kesepian adalah musuh terbesar di hari tua. Ungkapan yang menyebutkan bahwa seorang ibu bisa merawat anak-anaknya, namun anak-anaknya belum tentu bisa merawat seorang ibu, agaknya benar adanya. Terkadang anak-anak sanggup mencukupi kebutuhan materi orang tua. Namun, sejatinya yang dibutuhkan orang tua adalah berkumpul dan berpelukan hangat dengan anak-anaknya.

Penulis: Agus Wahyudi Editor: Aditya Pradana Putra

M yang semula membenci Amah tiba-tiba merasa iba melihat Amah di panti jompo. Akhirnya, M mendatangi panti jompo dan mengajak Amah tinggal di rumah ibunya. Amah dirawat dengan baik di rumah Sew sampai akhirnya meninggal dunia. Keluarga berencana memakamkan jenazahnya ke pemakaman umum.

Tiba-tiba M mendapat telepon dari bank yang menginformasikan bahwa Amah memiliki tabungan 2.000.000 baht yang selama ditabung untuk M. Perasaan M bercampur aduk antara sedih dan menyesal karena telah menganggap Amah tidak adil. Nyatanya Amah sangat sayang dan memikirkan masa depannya. Tanpa pikir panjang, M mengambil semua uang tabungan tersebut. Satu juta baht digunakan untuk membeli sebuah tanah makam impian Amah.

#### Simpulan

Film berdurasi 120 menit ini mengadukaduk emosi penonton. Guncangan emosi yang dihadirkan benar-benar dirasakan penonton. Di awal, film ini terasa lambat, namun masih bisa ditutupi dengan adegan dan dialog yang membuat penonton terpingkal. Memasuki pertengahan, penonton dibuat terdiam, bahkan sesekali terlihat mengusap air mata. Puncaknya, di akhir film, disuguhkan scene yang bisa membuat penonton sesenggukan.



Diundang Kendurian di Lokasi Sumur Minyak Kisah Mistis di Sela Tugas "Pengalaman spiritual saat tugas lapangan bersama Tim Gabungan KPP Migas, DJP, SKK Migas, dan BPKP ke KKKS Energi Mega Persada Malacca Strait. Lokasi lapangan sumur minyak berada di Pulau Panjang, Kepulauan Riau, Pekanbaru. EMP Malacca Straits adalah anak perusahaan Bakrie Brother. Saat pemeriksaan dilakukan sudah tidak memiliki produk crude oil yang ekonomis. Kesulitan dana yang dialami mengakibatkan area sumur minyak ini tidak terawat. Perjalanan dilakukan sekitar bulan September tahun 2019."

isah ini terjadi saat tim gabungan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi (KPP Migas) mewakili Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang terdiri dari empat orang melakukan kunjungan kerja ke lokasi sumur minyak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas: EMP Malacca Strait yang berada di Pulau Panjang, Kepulauan Riau.

Hari sudah menjelang sore ketika kami tiba di lokasi sumur minyak yang cukup jauh. Perjalanan kami dari Jakarta menggunakan jenis transportasi darat, udara. dan laut.

Dari Bandara Soekarno Hatta, kami menggunakan penerbangan pagi menuju Pekanbaru. Setelah sampai di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, kami melanjutkan perjalanan darat ke Pelabuhan Lalang yang ditempuh dalam waktu 7 jam dari Pekanbaru. Sampai di Pelabuhan Lalang, perjalanan dilanjutkan dengan speed boat selama 1 jam menuju sebuah kabupaten di Pulau Panjang, Riau.

Speed boat yang kami tumpangi atas nama EMP Malacca Strait. Selain kami, ada kru berseragam coverall berwarna hijau dengan strip abu metalik yang sedang bergantian tugas atau crew change. Penumpang speed boat tidak banyak saat itu. Speed boat melaju kencang, gelombang air laut yang membentur perut kapal membuat kami terguncang kencang. Suara air laut yang menerpa jendela seolah menyapa dan mengucapkan selamat datang.

Speed boat berhenti kurang lebih 200 meter dari bibir pantai, setelah turun dari speed boat kami berjalan menuju gerbang kantor melalui jembatan dermaga yang terbuat dari kayu yang terlihat estetik. Jika dilukiskan, pemandangannya mirip dengan foto-foto wisata yang memajang pantai dengan langit biru.

Di gerbang kantor kami disambut petugas, kami dijemput kendaraan khusus untuk masuk area kantor dan mes KKKS. Karena hari sudah mulai gelap, kami langsung diarahkan ke mes khusus tamu yang berada di lokasi paling pinggir mes karyawan KKKS.

Saat memasuki mess karyawan, saya mulai merasakan aura yang berbeda. Suasana hangat pantai berubah menjadi suasana yang sepi. Walaupun para karyawan masih banyak yang bekerja, tapi lingkungan sarana dan prasarana sepertinya kurang terawat. Di halaman terlihat rumput yang tinggi dan belum dipotong, daun-daun yang rontok juga belum dibersihkan.

Kami sempat menyapa para karyawan yang menyambut kami datang dan beberapa pegawai lapangan yang baru tiba dari sumur minyak lepas pantai. Suara riuh tawa dari beberapa pegawai lepas pantai yang masih memakai seragam lapangannya menemani kami saat itu.

Sore itu kami menuju kamar tamu yang disediakan. Kami melewati lorong kantor. Ada taman kecil yang dikelola petugas dapur, ada tanaman cabai, tomat sampai pare. Di tengah taman, ada sebuah pohon besar yang membuat sekitarnya begitu

sejuk. Tak lama kemudian muncul kerakera cokelat di antara lorong. Tentu saja kami kaget, karena kera ini berjumlah banyak, menggendong anak-anaknya berloncatan di antara kepala kami. Beberapa dari mereka menjauh setelah dihalau.

Kamar tamu ini benar-benar berada di area paling pinggir mess KKKS, berbatasan dengan hutan. Terdapat jalanan aspal di depan kamar dan ada sebuah lapangan rumput yang rumputnya sudah sangat tinggi. Tidak jauh dari jalan, ada pohon beringin yang dahan dan daunnya menjuntai sampai ke tanah. Di balik pohon ternyata ada sebuah danau yang juga sudah tak terawat. Permukaannya berwarna hijau ditumbuhi semacam lumut, ada gazebo di tengahnya. Ada patung sepasang angsa yang sudah berwarna coklat. Suasana sepi di sekitarnya membuat saya bergidik. Tak jauh dari sana ada ladang kosong dan pinggir hutan yang gelap.

Perasaan saya mulai tidak enak. Saya merasa akan ada yang datang berkunjung malam ini. Sejujurnya sejak awal datang saya sudah memiliki perasaan tidak enak, merasa merinding, bercampur takut. Kelebihan saya cuma satu, sok berani. Saya merasakan suasana yang sangat hening.

Selesai makan malam kami segera tidur. Esok kami akan ke lepas pantai mengecek kapal tanker minyak Alpine Madeleine yang ada di tengah laut.

Malam itu, saya tidur dengan berpakaian lengkap: jaket tebal, celana panjang, berkerudung rapi, dan memakai kaos kaki. Sepatu lapangan sudah tersedia di samping tempat tidur. Saya berpikir jika ada kejadian tidak diinginkan, maka saya bisa segera lari menggedor kamar sebelah. Televisi saya nyalakan dengan volume suara keras. Saya menyalakan lampu kamar dan mengunci pintu. Anehnya, saya tertidur dengan cepat dan lelap.

Perasaan yang saya duga sebelumnya

ternyata benar. Saya kedatangan tamu, dua orang ibu berambut pendek dan berkulit putih. Membawa seorang anak lelaki kecil. Ketiganya sangat ramah. Mereka datang menemani saya tidur. Kedua ibu tidur di dekat kaki saya. Si anak lelaki tidur di tempat tidurnya sendiri.

Ketika waktu mendekati pukul 02.00 pagi, saya hanya mengira-ngira saja karena saya tidak melihat jam. Saya baru tidur sebentar. Kedua ibu itu tiba-tiba terbangun dan mengajak saya untuk berkunjung ke rumah Oma. Katanya, Oma lagi punya kenduri, semacam makanmakan merayakan sesuatu. Mereka mengajak saya serta. Saya mengikuti kedua ibu itu berjalan dan pergi.

Kami berjalan beriringan menuju rumah Oma. Rumahnya mirip seperti rumahrumah kebanyakan di wilayah Kepulauan Sumatra. Rumahnya terpasang tenda dan banyak tirai berwarna putih yang harus saya sibak untuk bisa berjalan. Suara musik terdengar keras, banyak suara orang mengobrol tapi saya tidak melihat seorangpun.

Saya menghampiri Oma yang sedang duduk di ruang tengah. Kami bersalaman dan saling menyapa. Wajahnya putih dan tubuhnya gemuk, rambutnya pendek berwarna keabuan. Ia terlihat senang melihat saya datang. Sambil tersenyum Oma mempersilakan saya menikmati hidangan. Sekilas saya melihat meja panjang yang penuh makanan. Saya berjalan melewatinya. Saya mencari kedua ibu tadi, kemana mereka saya tidak melihatnya lagi. Karena merasa sendirian, saya mencari jalan untuk keluar dari rumah Oma. Saya berniat kembali ke mes karena masih mengantuk dan memilih untuk tidur saja.

Esok paginya, saya terbangun dengan suasana hati yang tidak nyaman tapi merasa lega. Tidak ada kejadian yang menyeramkan. Saya justru merasa mendapat kehormatan, karena dikunjungi dan berkenalan dengan Oma.

Saat saya keluar dari mes dan mau memulai tugas, saya memandang danau



di seberang mes. Saya merasa yakin, langkah saya semalam menuju ke danau itu. Jalan aspal di depan mes ini mirip sekali dengan jalanan semalam. Saya bergidik. Saya bersyukur masih bisa kembali ke dunia nyata.

Sampai hari ini, setelah 4 tahun berlalu sejak kejadian itu, saya masih merasa tidak percaya dengan kejadian yang menurut saya agak mistis ya. Boleh percaya atau tidak, sampai hari ini saya masih ragu siapakah kedua ibu itu?. Siapakah Oma yang ramah dan baik hati itu?

Saya percaya dan yakin bahwa makhluk tak kasat mata itu ada. Karena Allah juga menciptakan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Jadi tentang kedua ibu dan Oma baik hati itu, saya percaya mereka sebenarnya ada di sekeliling mes KKKS yang saya kunjungi.

Setelah pertemuan malam itu, tidak ada lagi kejadian aneh yang saya alami. Saya bertugas seperti biasa sampai berakhir di hari ketiga. Di hari terakhir bertugas, saya bertemu lagi dengan beberapa kera yang berkerumun. Dalam hati saya bergumam, mungkin di antara kera-kera itu ada jelmaan kedua ibu yang waktu itu menghampiri saya. Wallahu A'lam bishawab.

Saat ini, lokasi sumur minyak itu sudah tidak ada lagi. Pegawai KPP Migas sepertinya harus berlega hati karena tidak perlu bertugas ke lokasi tersebut.

Kejadian di lokasi sumur minyak di Pulau Panjang Kepulauan Riau itu menjadi satu satunya pengalaman mistis saya selama 4 tahun bertugas di KPP Migas. Kondisi seperti itu bisa saja terjadi karena beberapa hal. Misal, kondisi psikis yang lelah, berada pada suatu tempat yang



baru, ditambah lokasi yang tidak terawat, dan jarang dikunjungi manusia.

Menurut beberapa sumber, manusia dan makhluk tak kasat mata bisa berinteraksi jika keduanya berada dalam frekuensi yang sama. Ada juga yang mengalami kehadiran makhluk tak kasat mata saat sedang stres atau sibuk. Namun, hal ini bukan berarti mereka bisa melihat atau berbicara dengan makhluk tersebut secara jelas.

Adapun manusia tidak ada satu pun yang mengetahui perkara gaib, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tugas kita hanya beribadah termasuk bekerja. Makhluk ciptaan tak kasat mata tidak hanya ada di sumur-sumur minyak atau tempat yang jauh dan tak terawat, dia bisa juga ada di sekitar kantor kita menemani kita bekerja. Peristiwa diundang kendurian Oma di lokasi sumur minyak menjadi

pengalaman yang tidak ingin saya ulang. Namun, tugas kunjungan kerja ke lokasi pertambangan migas di seluruh wilayah Indonesia memang merupakan sebuah pengalaman yang menarik dan menantang.

Penulis: Indrayanti R Pangastuti (KPP LTO 3)

Editor: Ifta Ilfia Utami







Sepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Tidak hanya bagi kalangan pria, banyak juga dari kalangan wanita menyukai olahraga ini. Dari anak-anak hingga dewasa, semua menyukai sepak bola. Bahkan banyak orang yang sudah tidak berusia muda lagi masih aktif bermain sepak bola. Pesepak bola asal Jepang, Kazuyoshi Miura, yang berusia 54 tahun masih bermain di level tertinggi sepak bola Jepang. Di Indonesia kita juga mengenal beberapa pemain gaek yang masih aktif bermain bola di level profesional, seperti Cristian Gonzales dan Alberto Goncalves yang sudah berusia 40 tahun lebih. Teknik, fisik, kecepatan, keseimbangan badan, dan akurasi menendang bolanya masih sangat jelas terlihat meski usia tidak muda lagi untuk ukuran pemain sepak bola.

Sebagai salah satu olahraga terpopuler di dunia, bermain sepak bola sudah menjadi kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan bagi sebagian orang. Sama halnya dengan olahraga lain, sepak bola juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Dikutip dari berbagai sumber, beberapa manfaat dari sepak bola sebagai berikut.

#### 01

### Menjaga kebugaran dan menurunkan berat badan

Sepak bola adalah olahraga yang efektif untuk membakar lemak. Gerakangerakan dalam sepak bola dapat memicu keluarnya keringat secara masif, seperti berlari dan mengejar bola sehingga akan membantu tubuh menjadi lebih bugar. Kondisi ini baik untuk kesehatan tubuh karena bisa mengurangi risiko terkena penyakit berbahaya, seperti kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, dan timbulnya gangguan bernapas (asma). Kebugaran tubuh sangat diperlukan agar bisa melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, apalagi di musim pandemi. Selain itu, bermain sepak bola juga dipercaya bisa membantu mengontrol kenaikan berat badan.

#### 03

#### Menjaga kesehatan jantung

Selama bermain sepak bola, tubuh akan terus bergerak. Hal ini menyebabkan detak jantung menjadi lebih cepat dan bernapas lebih sering. Aktivitas ini bisa mengoptimalkan kinerja jantung. Sama seperti olahraga kardio lainnya, sepak bola dapat menjaga detak jantung tetap normal. Selain itu, gerakan aktif secara berulang juga efektif untuk melawan penumpukan kotoran di arteri yang bisa memicu penyakit jantung koroner. Dengan begitu, potensi terserang berbagai penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke bisa diminimalkan.

#### 02

#### Memperkuat otot dan tulang

Salah satu manfaat bermain sepak bola vang bisa kita dapatkan adalah dapat menguatkan otot dan tulang. Gerakan menendang, melompat, dan berlari membutuhkan otot dan tulang sebagai penopang. Gerakan-gerakan tersebut dapat melatih otot menjadi lebih kuat dan lentur. Bukan hanya otot kaki, otot tubuh bagian atas juga diperlukan dalam olahraga ini. Otot ini digunakan untuk menahan lawan, melindungi bola, dan melakukan lemparan ke dalam lapangan. Gerakan-gerakan tersebut bisa membuat otot lengan dan sendi atas menjadi lebih terlatih. Bermain sepak bola secara rutin menjaga tulang dan otot tetap kuat.

#### 04

#### Meningkatkan kinerja otak

Tidak melulu soal fisik, sepak bola juga memberikan manfaat untuk kesehatan otak. Olahraga ini mengharuskan kita untuk berkonsentrasi, disiplin, dan mengatur taktik agar dapat memenangkan pertandingan. Kadangkadang ritme permainan yang terjadi menjadi lebih cepat sehingga kita harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Misalnya, apa yang harus dilakukan setelah menerima umpan, mempertahankan area sendiri saat ada lawan menyerang, dan mencari kawan satu tim untuk mengoper bola. Semua hal tersebut membutuhkan keputusan yang cepat. Hal ini akan memacu saraf kognitif untuk bekerja lebih keras. Jadi, bermain sepak bola akan melatih otak agar terbiasa untuk berpikir cepat.





#### 05

#### Membangun karakter tanggung jawab.

Sepak bola bukanlah olahraga yang menekankan keahlian individu semata. tetapi juga mengedepankan kerja sama tim secara keseluruhan. Bermain sepak bola dapat melatih karakter setiap pemain untuk lebih bertanggung jawab. Misalnya, posisi pemain belakang harus bertanggung jawab mengamankan daerahnya agar tidak bisa ditembus pemain lawan. Posisi gelandang tengah harus bertanggung jawab mengalirkan bola ke depan. Begitu pula dengan pemain lain. Semua pemain harus bertanggung jawab di posisinya masing-masing. Sepak bola dapat mengembangkan kepribadian para pemainnya agar lebih bertanggung jawab.

Selain lima manfaat dari olahraga sepak bola yang disebutkan diatas, sepak bola juga dapat menghilangkan stres dan memberikan rasa gembira. Setelah kita bermain bola, bisa dipastikan kita akan merasa bahagia. Bagi sebagian orang, bermain bola adalah sarana untuk melepaskan stress, baik dari masalah pekerjaan, kuliah, atau masalah yang dihadapi sehari-hari. Hal tersebut disebabkan hormon endorfin yang dilepaskan ke dalam tubuh setelah bermain bola dapat mengurangi rasa stres dan kecemasan yang berlebih.

#### Fenomena Fun Football

Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia sedang marak adanya fenomena sepak bola gembira atau biasa disebut fun football. Dinamakan fun football karena kegiatan ini memang dimainkan oleh orang-orang yang mempunyai hobi sepak bola yang kemudian mereka membentuk komunitas untuk bermain bola bersama, dengan tujuan mencari kesenangan. Maraknya fun football ini juga dipengaruhi beberapa hal. Di antaranya adalah semakin banyaknya fasilitas lapangan yang berstandar nasional, bahkan internasional. Tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, keberadaan lapangan-lapangan tersebut juga ada di desa-desa. Keberadaaan lapangan bagus serta kemudahan akses untuk bermain di dalamnya semakin membuat banyak orang dan komunitas bersemangat untuk bermain sepak bola. Tak jarang beberapa komunitas melakukan tour stadion ke luar kota, misalnya ke Bandung, Solo, Semarang, Boyolali, Yogyakarta, dan kotakota lainnya.

Di era medsos ini, tidak dapat dimungkiri eksistensi dan konten menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa ditinggalkan. Adanya para fotografer olahraga yang siap mengabadikan momen-momen saat bermain sepak bola menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini membuat fenomena fun football semakin menggeliat. Para fotografer ini rata-rata bertarif 300-500 ribu rupiah per sesi (kurang lebih 2 jam) sesuai dengan jadwal sewa lapangan. Dengan adanya juru foto ini, kita dapat bergaya layaknya pemain profesional. Dalam sekali *game* saja, kita sudah dapat bahan konten untuk mengisi platform medsos kita. Tentunya dengan kualitas foto-foto yang ciamik, benar-benar seperti pemain bola benaran.

Di internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri juga ada komunitas fun football. Tax Army namanya. Komunitas itu sudah terbentuk sejak lama. Tax Army rutin

berlatih seminggu atau dua minggu sekali. Biasanya sesuai kesiapan pemain dan ketersediaan lapangan. Maklum lapangan bola di Jakarta dan sekitarnya sekarang menjadi komoditas yang laris manis. Untuk menyewa sebuah lapangan, kita harus berebutan dengan para calon penyewa lainnya.

Walaupun sifatnya fun football, Tax Army meraih prestasi. Tim yang dikomandoi oleh Coach Nawe ini menjadi pemegang juara turnamen antar unit eselon I







Kementerian Keuangan edisi terakhir sebelum pandemi, yang diselenggarakan tahun 2019. Turnamen ini rutin diselenggarakan setiap tahun di Stadion Bea Cukai Rawamangun. Sayang, momen juara tersebut belum dapat terulang kembali pada dua edisi turnamen setelah pandemi. Semoga tahun ini juara lagi. Walaupun sifatnya sepak bola gembira, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat meraih prestasi.

Sepak bola tetap menjadi olahraga paling favorit saat ini. Selain memberikan segudang manfaat di atas, sepak bola juga menghadirkan keceriaan saat bermain, bahkan dapat memberikan rasa bangga jika berhasil menjuarai suatu pertandingan.

Salam sepak bola.

Penulis: Mudrik Nazari (KPP PMB) Editor: Aditya Pradana Putra





# Pesona Gunung Merbabu

### dan Jalur Pendakiannya yang Bikin Nagih



etika mendengar kata puncak gunung, yang terlintas dalam pikiran kita adalah tentang keindahan alam, udara yang segar, pemandangan yang memanjakan mata, dan hamparan awan putih yang menyelimuti lembah. Namun, lain halnya dengan mendaki gunung. Ada yang mengatakan buat apa sih capek-capek mendaki gunung. Tidak heran kalau banyak yang berpendapat seperti itu, karena mendaki gunung membutuhkan effort yang besar. Tidak hanya membutuhkan tenaga, tapi juga waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Bagi seorang yang senang mendaki gunung, segala *effort* tersebut juga tidak lepas dari pikiran dan pertimbangannya, tapi karena *passion* yang dimiliki, membuat mereka merasa senang untuk melakukannya. Apalagi faktanya, bagi sebagian orang mendaki gunung merupakan kegiatan yang bisa *bikin* ketagihan. Persis seperti yang saya alami ketika ada teman yang menawarkan untuk ikut *open trip* pendakian ke puncak Gunung Merbabu.

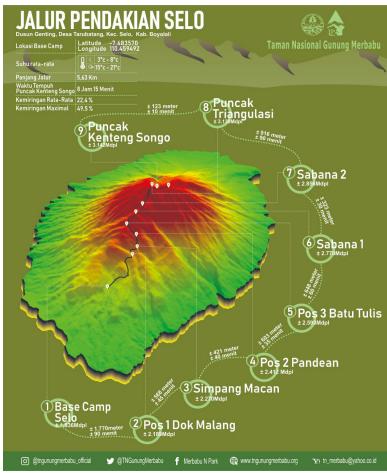
Dorongan hati saya untuk mengikuti pendakian ini ternyata cukup kuat, ditambah ada kesempatan liburan cuti bersama yang jarang didapatkan di lain waktu. Selain itu, sejak remaja saya memang suka mendaki gunung, itu juga yang memantapkan hati saya untuk ikut trip ini. Mengenang kembali petualangan di masa muda.



Saya sebenarnya sudah pernah mendaki Gunung Merbabu pada tahun 2002, saat itu saya masih berusia 17 tahun. Bagi orang yang sudah pernah menginjakkan kaki di puncak Gunung Merbabu, ada satu hal yang tidak akan pernah terlupakan, yaitu pemandangan Gunung Merapi yang gagah dan menawan terlihat jelas dari kejauhan. Kenangan itu selalu membekas di pikiran saya. Terakhir melihatnya lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Tak pernah saya bayangkan sebelumnya, tahun 2024 ini saya bisa ke sana lagi.

Gunung Merbabu merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Tengah dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut (MDPL). Secara administratif gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat, Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan, dan Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara, Provinsi Jawa Tengah. Kata teman saya, "Kalau kamu naik pesawat terbang dari Bandara Adisutjipto Yogyakarta menuju Jakarta, kamu bisa melihat kegagahan Gunung Merbabu dari udara dengan jelas."

Ada empat jalur pendakian resmi yang dapat diakses menuju ke puncak Gunung Merbabu, yaitu Jalur Suwanting, Jalur Wekas, Jalur Cunthel, dan Jalur Thekelan. Untuk pendakian kali ini, saya dan rombongan memilih Jalur Selo, Boyolali. Selain menyajikan pemandangan yang menakjubkan, jalur ini juga dikenal sebagai jalur yang cukup ramah bagi para pendaki pemula.



Penyelenggara open trip menentukan Stasiun Yogyakarta sebagai titik penjemputan. Peserta pendakian terdiri dari empat orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berasal dari Jakarta, Semarang, Purworejo, Klaten, dan Yogyakarta. Dari Jakarta, saya menggunakan kereta api malam, sampai di Stasiun Yogyakarta pukul empat dini hari. Sebelum pendakian, kami semua sudah diminta melakukan pendaftaran

Pukul 07.00 WIB, semua peserta berkumpul di lokasi yang sudah ditentukan, kami diantar oleh penyelenggara open trip ke base camp Selo. Perjalanan dari stasiun Yogyakarta ke base camp yang berada di Boyolali ditempuh selama kurang lebih dua jam dengan menggunakan mobil berkapasitas enam orang. Dari obrolan kami, ternyata semua pendaki pria di rombongan ini sudah pernah mendaki ke puncak Gunung Merbabu. Gunung ini memang memiliki kesan tersendiri yang membuat pendakinya selalu ingin kembali.

Sesampainya di base camp Selo, hal yang sebelumnya saya duga pun terjadi. Kami disambut oleh hujan yang cukup deras dan membuat perjalanan pendakian tertunda. Tempat yang digunakan sebagai base camp adalah sebuah rumah dengan beberapa ruangan yang cukup besar. Ruangan-ruangan tersebut bisa digunakan untuk lima grup pendaki melakukan persiapan sebelum pendakian dan beristirahat setelah pendakian. Tersedia juga kamar mandi yang cukup banyak. Ada beberapa rumah penduduk yang digunakan sebagai base camp di Selo.



Setelah beberapa saat menunggu dan berkemas, akhirnya hujan reda dan kami bisa memulai perjalanan menuju puncak Merbabu. Tepat pada pukul 10.00 WIB, kami berangkat dari base camp diawali dengan berdoa bersama. Sesuai itinerary, kami akan bermalam menggunakan tenda di pos empat pada ketinggian 2.770 mdpl, sebelum melakukan summit attack keesokan harinya.

Dalam pendakian ini, kami ditemani oleh dua orang pemandu yang akan mendampingi dan membantu kami selama perjalanan sampai puncak gunung. Mendaki gunung di zaman sekarang sungguh dipermudah dengan adanya penyelenggara open trip. Para pendaki cukup membawa barangbarang pribadi, seperti pakaian, obatobatan, makanan ringan, jas hujan, dan air minum. Penyelenggara sudah menyediakan porter sekaligus pemandu untuk membawa perlengkapan berkemah, bahkan makan siang, makan malam, dan sarapan disiapkan juga oleh penyelenggara. Fasilitas-fasilitas tersebut saya dapatkan dengan membayar Rp830.000, tidak termasuk ongkos kereta api.

Bagi pendaki yang tidak ingin repot membawa barang pribadi, bisa menggunakan jasa porter pribadi dengan menambah biaya tentunya. Setiap pendaki diwajibkan membawa minimal dua botol besar air minum karena dari base camp sampai dengan puncak, tidak terdapat mata air yang bisa dimanfaatkan oleh para pendaki. Sehingga seluruh air yang dibutuhkan selama perjalanan harus dibawa dari base camp.

Perjalanan dari basecamp ke pos satu ditempuh dalam waktu 30 menit sampai satu jam. Medan yang dilalui berupa hutan tropis yang masih cukup landai dengan vegetasi berupa pohon-pohon tinggi dan besar. Sepanjang perjalanan, kami bertemu dengan banyak pendaki lain karena saat itu bertepatan dengan momen libur long weekend.

Setelah istirahat sejenak di pos satu, perjalanan kami lanjutkan menuju pos dua dengan medan yang sedikit lebih menanjak namun masih dengan vegetasi yang sama dengan sebelumnya. Di tengah perjalanan menuju pos dua, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan turun, dan kami pun harus menggunakan jas hujan (ponco). Pemandu terus memberi semangat agar kami dapat menuntaskan pendakian ini.

Perjalanan mulai sedikit lebih menantang dengan jalan yang menanjak ditambah guyuran air hujan yang membuat tanah yang dilalui menjadi licin. Kondisi jalan ini kami lalui selama kurang lebih satu jam hingga kami sampai di pos dua. Hujan mulai berhenti dan kami pun melepas jas hujan dilanjutkan dengan makan siang selama kurang lebih 15 menit. Sebungkus nasi dengan lauk alakadarnya terasa begitu nikmat kami santap.

Kami melanjutkan perjalanan menuju pos tiga, medan yang kami lalui sudah mulai berbeda dengan medan sebelum pos satu dan pos dua. Vegetasi mulai didominasi oleh tanaman perdu dan sedikit padang rumput (sabana). Di sini saya mendapat informasi dari pemandu bahwa jalur yg saat ini kami lalui adalah jalur baru menggantikan jalur lama yang mungkin dulu pernah saya lalui saat pertama kali saya ke sini.

Sebagian jalan menuju pos tiga ini berada di punggung bukit yang berbatasan langsung dengan jurang di sisi kiri dan kanannya. Dari sini terlihat pos dua tempat kami istirahat makan siang tadi yang berada di bawah kami. Jika cuaca sedang cerah, dari jalur ini akan terlihat gunung merapi yang berdiri dengan gagah di sebelah selatan. Sayang saat kami melaluinya, cuaca masih kurang bersahabat, dan gunung merapi masih bersembunyi di balik kabut tebal.



Berselang beberapa saat, kami pun tiba di pos tiga. Posisi pos tiga berada di antara sebuah bukit yang di atasnya terdapat bangunan shelter tempat peristirahatan darurat jika terjadi badai dan bukit dengan tanjakan yang cukup curam yang merupakan jalur yang harus kami lalui berikutnya untuk menuju ke pos empat. Di sini para pendaki sudah bisa menemukan sabana yang lebih luas dihiasi dengan tanaman bunga edelweis. Seandainya cuaca cerah, tentu pemandangan di sini akan sangat indah.

Tak mau berlama-lama beristirahat kami pun bergegas melanjutkan perjalanan ke pos empat. Di jalur ini kami benar-benar tidak menemukan bonus, istilah bagi para pendaki jika bertemu dengan jalur yang landai atau menurun. Bahkan di beberapa titik dengan tingkat kemiringan hampir 70 derajat, terpasang tali sebagai pegangan bagi para pendaki agar tidak terjatuh. Kaki kami pun sudah mulai terasa letih karena harus melalui jalan menanjak yang licin terkena guyuran air hujan sebelumnya.

Namun, rasa letih itu sedikit terobati ketika kabut di belakang kami mulai tersibak. Gunung Merapi yang sebelumnya bersembunyi, perlahan mulai menampakkan puncaknya. Langit biru di sisi barat pun mulai terlihat dengan Gunung Sumbing yang tampak seperti melayang di atas lautan awan berwarna putih. Sungguh pemandangan yang menakjubkan dan seketika rasa letih kami pun hilang untuk sejenak. Hari sudah menjelang sore saat itu.

Setelah menikmati sembari mengabadikan pemandangan indah melalui kamera ponsel, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menaiki beberapa tanjakan lagi untuk sampai di pos empat, tempat kami menginap. Pos empat berada di pinggir sabana dengan landscape landai yang cukup luas, sehingga memang cocok digunakan untuk tempat mendirikan tenda. Ada sekitar 20 tenda didirikan di pos empat. Kami pun beristirahat, makan malam, dan tidur di tenda yang telah disiapkan. Mengumpulkan tenaga untuk perjalanan esok hari yang lebih menantang, yaitu menuju puncak.

Pukul 02.00 dini hari, alarm berbunyi. Kami bangun dan melihat kondisi di luar tenda. Cuaca malam ini memang sangat tidak menentu. Saat itu, cuaca cerah, terlihat gugusan bintang di langit. Tak lama, tiba-tiba kabut pun turun menutup segalanya. Kondisi ini terus terjadi sampai beberapa saat sehingga kami pun menunda perjalanan menuju puncak. Menunggu cuaca lebih kondusif sambil mengisi perut dengan sepotong roti ditemani dengan secangkir kopi hangat.

Tepat pukul 03.30 WIB, kami memutuskan untuk berangkat menuju puncak (summit attack) bersama rombongan pendaki lainnya. Berbekal headlamp di masingmasing pendaki, kami berjalan melalui sabana menuju tanjakan yang berada tak jauh di depan kami. Jalur yang dilalui para pendaki di tanjakan terlihat sangat jelas dari kejauhan karena sorot headlamp dan senter yang dibawa oleh para pendaki.









Jalur yang kami lalui kali ini curam dan licin. Di beberapa titik kami harus berpegangan pada akar pohon di sisi kanan dan kiri jalan untuk dapat menaiki tanjakan. Sampai di pos lima, hujan sempat turun sebentar dan membuat kami sedikit khawatir hujan tidak mereda pada saat kami sampai di puncak. Namun kekhawatiran kami pun sirna ketika sampai di tengah perjalanan dari pos 5 menuju puncak. Hujan yang tadi sempat turun, mulai reda. Kabut yang menyelimuti perlahan mulai tersibak seiring terbitnya matahari di ufuk timur.

Setelah berjalan selama kurang lebih tiga jam, kami tiba di puncak pertama yaitu puncak kenteng songo yang berada pada ketinggian 3.122 mdpl. Di puncak ini terdapat sembilan buah watu lumpang (batu yang berbentuk seperti lesung dengan cekungan di tengah). Batu ini merupakan artefak peninggalan zaman megalitikum yang diduga menjadi

sarana ritual bagi masyarakat pada masa itu. Setelah puas berfoto bersama di puncak Kenteng Songo kami pun berjalan menuju ke puncak kedua yang letaknya tidak terlalu jauh, yaitu Puncak Triangulasi.

Puncak Triangulasi berada pada ketinggian 3.142 mdpl. Di sini, pemandangan yang sangat memanjakan mata tersaji dari berbagai penjuru mata angin. Di sisi barat, nampak Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau yang berdiri secara berurutan. Di sisi utara, nampak Gunung Andong, Gunung Ungaran, Gunung Muria serta pemandangan Kota Semarang, Salatiga dan Boyolali. Di sisi timur, nampak Gunung Lawu. Terakhir di sisi selatan, salah satu hal yang tidak akan pernah terlupakan oleh pendaki Gunung Merbabu, yaitu penampakan Gunung Merapi yang gagah berdiri membelakangi Kota Yogyakarta dan Waduk Gajah Mungkur.



Kami menghabiskan waktu kurang lebih satu jam di puncak Gunung Merbabu. Matahari mulai naik lebih tinggi, kami pun bergegas untuk turun karena waktu sudah semakin siang. Perjalanan turun menuju base camp tidak kalah menantang dibandingkan dengan perjalanan naik. Selain kondisi jalan yang miring dan licin, kaki pun harus menahan laju langkah agar tidak terjatuh. Beberapa pendaki terpeleset, namun tidak sampai terjadi cedera yang berarti.

Selama perjalanan turun, cuaca semakin cerah sehingga pemandangan Gunung Merapi dari puncak sampai kaki gunung terlihat dengan sangat jelas. Tak hentihentinya kami mengaguminya. Pukul 10.00 kami tiba kembali di tenda tempat kami menginap. Berkemas, sarapan, dan persiapan untuk turun menuju base camp. Tak lupa kami juga bawa kembali sampah-sampah kami sesuai dengan motto yang selalu disuarakan oleh para pendaki gunung yaitu "Jangan pernah mengambil sesuatu apapun di gunung selain foto, dan jangan meninggalkan apapun di gunung selain jejak".

Perjalanan dari pos empat menuju base camp kami tempuh dalam waktu empat jam. Pukul 14.30 kami tiba di base camp Selo, istirahat sebentar dan kemudian bersiap-siap untuk diantar menuju stasiun Yogyakarta. Kami sangat bersyukur karena semua anggota rombongan dapat pulang dengan sehat dan selamat.

Pengalaman mendaki Gunung Merbabu kali ini lagi-lagi akan sangat susah dilupakan. Saat-saat menyusuri hutan di jalur pendakian yang syahdu di bawah rintik hujan, melihat hijaunya hamparan sabana, menikmati pemandangan gugusan gunung-gunung terbaik di Jawa Tengah, menghirup udara pada ketinggian di atas awan dan merasakan hangatnya mentari pagi dari puncak merbabu bersama teman-teman baru, akan menjadi cerita tersendiri di balik pesona Gunung Merbabu.

Penulis: Triyono Editor: Ifta Ilfia Utami



"Salah satu hidden gem masakan khas Jawa di Blok M Square. Kedai Rukun Yakarta cocok bagi kamu kaum mendang-mending yang ingin merasakan masakan ala rumahan khas Jawa. Terletak di Jakarta Selatan, tepatnya di pujasera lantai rubanah Blok M Square pintu M-M2."



### Kedai Rukun Yakarta, Pengobat Rindu Masakan Ibu di Perantauan

ntuk kamu yang pertama kali berkunjung, Kedai Rukun Yakarta memang agak sulit ditemukan. Banyaknya pintu masuk ke pujasera lantai rubanah kerap membuat pengunjung kebingungan. Eits ... jangan putus asa dulu. Kamu bisa menemukan tempat ini dengan mengikuti petunjuk yang terdapat pada unggahan teratas akun instagramnya di @kedairukun.ykt.

Setelah sampai, kamu tinggal mencari tempat duduk yang kosong. Di sini, tempat duduk disediakan untuk pengunjung semua warung yang ada. Oleh karena itu, disarankan supaya kamu datang lebih awal agar mendapatkan tempat duduk yang nyaman—juga untuk memperkecil kemungkinan tidak kebagian beberapa menu yang sering habis saat telah sore. Hindari jam makan siang saat hari kerja karena antriannya bisa panjang. Kedai Rukun Yakarta buka dari Selasa sampai dengan Minggu mulai pukul 11.00–21.00. Khusus hari Jumat, kedai buka dari pukul 13.00–21.00.

#### Menu yang Berbeda Setiap Hari

Menu yang disediakan di kedai ini tidak hanya menu dari Yogyakarta saja, tetapi ada beberapa menu dari daerah lain yang masih khas Jawa. Menunya setiap hari berbeda. Jadi, kamu harus sering-sering melihat unggahan instagram Kedai Rukun. Biasanya, menu yang ada hari itu juga ditempel di depan kedai.

#### Cerita di Balik Kedai Rukun

Lebih dahulu populer di Yogyakarta, Kedai Rukun awalnya dibuka pada 2018 di teras rumah di gang Darussalam, Kadipiro, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Ide ini bermula dari mimpi keluarga kecil yang setiap hari mengobrol di teras sambil menikmati masakan ibu. Mereka berkeinginan agar masakan yang menjadi favorit itu bisa juga dinikmati orang lain. Ketika anak-anaknya mulai beranjak dewasa dan pindah dari rumah, mereka mulai merindukan masakan ibu dan memutuskan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pada 5 Februari 2018, Kedai Rukun resmi dibuka dengan harapan agar anak-anak yang berada jauh dari rumah (rantau) dapat merasakan kenikmatan masakan seperti yang biasa mereka nikmati di rumah.

Pada 2023, Kedai Rukun membuka cabang di Jakarta dengan nama Kedai Rukun Yakarta. Jakarta adalah kota metropolitan yang menjadi tempat berkumpulnya para perantau. Hal itu yang membuat Kedai Rukun yakin untuk membuka cabang di kota ini. Karena sebelumnya sudah terkenal di Yogyakarta, Kedai Rukun Yakarta sempat viral beberapa waktu lalu. Pada awal pembukaan, hanya butuh sekitar 3—4 jam sebelum semua menu di kedai ini ludes terjual.

#### Ndog Kriwil dan Mangut Manyung Asap Menu Favorit di Kedai Rukun

Pastikan kamu memesan Ndog Kriwil ketika mengunjungi Kedai Rukun. Menu favorit ini dibuat dari telur bebek yang digoreng garing dengan tampilan keriwil seperti namanya. Rasanya gurih dan tidak terlalu asin sehingga cocok dimakan bersama dengan menu lainnya. Harga satu porsi Ndog Kriwil adalah 10.000 rupiah.

Selain Ndog Kriwil, menu favorit lainnya adalah Mangut Manyung Asap. Menu ini tidak tersedia setiap hari. Jadi, kamu harus sering melihat unggahan menu dari Kedai Rukun di Instagram jika penasaran dengan rasanya. Kuah mangutnya memiliki rasa pedas yang lumayan, disajikan dengan irisan cabe dan daun kemangi yang menambah kesegaran. Saat pertama kamu mencicipi mangut manyung ini, rasanya seperti makanan yang dimasak ibu di rumah, dengan tekstur daging manyung yang mudah

dimakan, tidak terlalu keras atau terlalu empuk. Kamu dapat menikmati Mangut Manyung dengan harga 25.000 rupiah.

#### Harang Asem dan Oseng Mercon

Harang Asem adalah modifikasi dari garang asem dengan porsi dua sayap ayam yang ukurannya lumayan besar. Makannya tidak terlalu sulit karena dagingnya lembut. Ia disajikan dengan kuah segar asam, ditemani rasa pedas dari potongan cabe, serta tomat hijau. Menu ini cocok untuk kamu yang ingin makanan berkuah. Harga Harang Asem dibanderol 25.000 rupiah.

Ketika kamu mulai merindukan oseng mercon khas Yogyakarta, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan. Dagingnya empuk dengan cita rasa khas pedas manis Yogyakarta. Ukurannya kecil-kecil sehingga memudahkan saat dimakan. Oseng mercon ini cocok buat kamu yang pecinta makanan pedas. Kamu dapat memesan oseng mercon dengan harga 20.000 rupiah.

#### Jangan Ndeso dan Mangut Lele

Jangan Ndeso ini sebenarnya adalah sayur lodeh tempe. Saat pertama mencobanya, rasanya seperti makanan sayur lodeh tempe yang biasa dimasak ibu di rumah. Kuahnya gurih dan sedikit pedas dengan potongan cabai merah dan hijau serta tempe yang menambah nikmat. Harganya 10.000 rupiah.

Kalau kamu rindu dengan mangut lele khas Yogyakarta, coba satu paket mangut lele di sini, harganya 26.000 rupiah. Lele goreng dengan kuah mangut gurih dan pedas ini bisa mengobati kerinduan akan mangut lele khas Yogyakarta.

## Es Cakruk dan Es Tape Susu yang menyegarkan

Es Cakruk tidak lain adalah es teh manis khas Jawa. Ia tersedia dalam dua porsi, yaitu porsi biasa dan porsi jumbo. Porsi jumbo benar-benar menggunakan cangkir yang besar. Jadi, pastikan





kamu bisa menghabiskannya. Harga Es Cakruk biasa adalah 5.000 rupiah, sedangkan porsi jumbo seharga 8.000 rupiah. Selain itu, Es Tape Susu dapat menjadi pelengkap yang sempurna saat bernostalgia dengan masakan-masakan khas Jawa. Dengan rasa manis dan sedikit asam dari tape, minuman ini sangat menyegarkan. Harga es Tape Susu adalah 15.000 rupiah.

#### **Tempe Tepung dan Tahu Walix**

Tempe yang digoreng dengan baluran tepung ini dapat menjadi teman yang sempurna saat kamu makan di Kedai Rukun Yakarta. Rasanya gurih dan sedikit asin. Kamu bisa menambahkan cabai untuk membuatnya semakin nikmat. Menu lainnya adalah Tahu Walix, yang mirip dengan tahu bakso, hanya saja tahunya dibalik dan diisi dengan aci, lalu digoreng garing. Rasanya yang gurih dan krispi, ditambah dengan saus kecap dan potongan cabai, membuatnya semakin lezat. Tempe Tepung dan Tahu Walix ini per porsi dibanderol dengan harga 5.000 rupiah.

Penulis: Murniasih

Editor: Tobagus Manshor Makmun



# Pegawai Perempuan DJP, Pengarusutamaan Gender atau Feminis?

Artikel tentang pegawai perempuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang harus bekerja jauh dari keluarga, menjalankan peran ganda dan berupaya menyelesaikan permasalahannya sendiri. Didukung dengan pengarusutamaan gender, berusaha meredam semua gejolak permasalahan agar tidak menjadi kendala dalam pekerjaannya sehari-hari.



agi seorang perempuan, bekerja adalah sebuah tantangan. Apalagi bagi seorang ibu yang memiliki anak. Pengaruh tingkat pendidikan dan berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya, membuat seorang perempuan menetapkan diri untuk bekerja. Tidak hanya itu, bahkan perempuan bekerja kini menempati jabatan penting di beberapa instansi pemerintah, salah satunya DJP.

Berdasarkan data Kepegawaian Kantor Pusat DJP pada 2 Juni tahun 2022, pegawai perempuan DJP berjumlah 16.275 orang dari total pegawai 45.315 orang. Jumlah pemeriksa pajak di DJP per tanggal 2 Januari 2024 berjumlah 6.158 pegawai dan 718 diantaranya pegawai perempuan. Hampir 50% dari total pegawai adalah pegawai perempuan usia produktif usia 25-40 tahun.

Dari total pegawai DJP, 30%nya adalah pegawai perempuan. Pegawai perempuan Pemeriksa Pajak berjumlah sekitar 11,6 % dari total pemeriksa. Di beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, Pemeriksa Pajak perempuan hanya sekitar 2 sampai 4 orang dari sekitar 30 orang pegawai pemeriksa pajak. KPP yang berada di luar pulau Jawa memiliki 5 orang pegawai perempuan pemeriksa pajak dari 12 orang pemeriksa, atau hampir 50% dari total pemeriksa pajaknya adalah perempuan.

Di era Pengarusutamaan Gender (PUG), tugas dan kewajiban seorang pegawai sudah diatur dan disesuaikan, tidak hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Ketentuan PUG ini sudah dibuatkan petunjuk pelaksanaannya dengan terbitnya beberapa Peraturan Menteri Keuangan. Bagaimana sebenarnya kehidupan seorang pegawai perempuan DJP? Apakah mereka bekerja dengan pertimbangan pengarusutamaan gender atau feminisme semata?

Sri Mulyani pernah memberikan pidatonya pada acara peringatan Hari Perempuan Internasional yang



diselenggarakan oleh Plan Indonesia. "Modalnya adalah mereka (perempuan) memiliki sensitivitas pada lingkungannya. Apa yang bisa saya bantu?. Itu adalah ciri leader, bukan tentang me, me, me. Kepedulian dan keinginan untuk melakukan sesuatu yang membantu orang lain, karena Anda sebenarnya punya alasan untuk tidak berbuat apaapa. Tapi kalau begitu mau jadi apa?" kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui, perempuan berkarier kerap menghadapi posisi sulit. Meski saat ini pemerintahan menerapkan sistem *merit* yang bertujuan membangun kesempatan yang adil untuk laki-laki dan perempuan, namun perempuan tetap berbeda dengan laki-laki. "Oleh



sebab itu, seorang pemimpin harus memberi afirmasi bagaimana membuat perempuan bisa mengatasi berbagai kritikal keputusan yang tidak mudah," kata Sri Mulyani.

PUG adalah salah satu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Tujuannya, untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan

pembangunan nasional dan daerah.

PUG sangat berbeda jauh dengan konsep feminisme. PUG sangat memperhatikan perbedaan yang ada antara laki laki dan perempuan berkaitan kodrat yang dimiliki oleh perempuan. Sedangkan feminisme memiliki pengertian yang sempit demi kesetaraan perempuan dengan laki-laki tanpa mempertimbangkan bahwa kodrat perempuan memang sudah berbeda.

Beberapa pihak berpendapat PUG adalah salah satu cara memasukkan pengaruh feminisme dalam pemerintahan. Karena tujuannya untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama antara perempuan dan laki-laki. Namun, PUG bukanlah nama organisasi

atau gerakan feminis tertentu.

Banyak orang mengaitkan feminisme dengan kesetaraan gender. Beberapa yang lain memahaminya sebagai suatu istilah yang mengacu pada ketidakadilan terhadap perempuan.

Hal yang sering disalah artikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan perempuan. Gender sejatinya adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial dan budaya.

DJP sendiri menerapkan PUG antara lain dengan memberi keutamaan bagi perempuan yang melahirkan untuk tetap mendapatkan tunjangan kerja tanpa dipotong cuti melahirkan. Pegawai perempuan juga diberikan fasilitas penunjang seperti *nursery room*, *mushola* khusus perempuan, klinik, dsb.

Akan tetapi ada hal lain yang masih perlu dipertimbangkan dalam hal penerapan PUG ini, yaitu masalah penempatan pegawai perempuan di luar *home base*, luar Pulau Jawa, misalnya. Beberapa teman pemeriksa pajak perempuan usia produktif yang saat ini tengah bertugas di luar Pulau Jawa mengalami beberapa kesulitan yang harus diatasi sendiri.

Seorang pemeriksa pajak perempuan bernama Mita, usia 41 tahun memiliki tiga orang anak usia sekolah dengan rentang usia 15, 13, dan 5 tahun. Pada awalnya Mita merasa bersyukur ditempatkan di suatu kota di bagian Pulau Sumatera. Katanya, "Anak-anak ikut pindah tinggal bareng aku. Mereka senang dan sangat betah. Sekolahnya dekat, kita bisa saling bertemu dengan jarak waktu 10 menit saja." Mita dan suaminya sama-sama bekerja sebagai pegawai DJP. Suaminya, Anwar, di Jakarta. Anwar menjenguk mereka setiap dua minggu sekali.

"Alhamdulillah, aku punya asisten yang bisa jaga anak-anak saat aku kerja. Tapi aku bingung kalau harus dinas pemeriksaan, lokasinya jauh-jauh. Perjalanan darat bisa 2 sampai 4 jam, mengharuskan menginap. Apalagi kalau harus menyeberang pulau, perlu waktu 3 hari untuk menuju lokasi dan kembali saat ada jadwal kapal cepat kembali ke kota", tambah Mita lagi.



Kisah seorang pemeriksa pajak di kota lain, Nia, usia 38 tahun memiliki 2 anak usia sekolah 12 dan 8 tahun. Nia memboyong kedua anaknya untuk tinggal bersamanya, berjauhan dengan suaminya yang tugas di kota berbeda. Awal yang sulit dihadapi adalah ketika proses penyesuaian, tidak hanya dibutuhkan bagi pegawai yang bersangkutan tetapi anggota keluarganya juga. "Anakku berkali-kali masuk UGD, demam berhari-hari karena rindu ayahnya dan teman-temannya," kata Nia sedih. Saat bersamaan Nia harus masuk kantor atau mengambil cuti untuk menemani anaknya di Rumah Sakit.

Cerita yang berbeda dialami Anggun. Dia dan suaminya sama-sama pegawai DJP. Anggun bercerita, ketika dia harus mutasi ke kota Palembang di saat putrinya masih usia 5 tahun. Putrinya harus tinggal sendirian di rumah bersama asisten rumah tangganya yang tidak menginap. Setiap malam putrinya tidur sendirian, asistennya akan pulang ke rumahnya sendiri setelah mengunci rumah dari luar. Esok pagi si asisten akan datang lagi untuk menyiapkan sekolah dan makan putrinya. Suaminya, Iwan, dinas di Semarang. Anak sulungnya masuk pesantren di Cirebon. Bersyukur mereka memiliki asisten rumah tangga yang bisa dipercaya.

Beberapa pegawai pemeriksa pajak perempuan, saat ini sudah ditempatkan di berbagai kota kecil yang ada di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Mereka masih harus menempuh perjalanan darat sepanjang 150 km atau 2 sampai 3 jam perjalanan darat dari bandara. Mereka bukan perempuan yang menginginkan kesetaraan seperti laki-laki, mereka tidak mengeluh, tangguh dalam setiap tugas, tapi juga bisa menangis ketika harus berhadapan dengan buah hati. Mereka tidak mengenal feminisme.

Sebagai seorang ibu dan orang tua, yang juga pegawai DJP, tentunya tidak mudah ketika membesarkan dan mendidik anak tanpa *support system* yang memadai. Banyak hal yang harus dikorbankan. Pilihan sepenuhnya menjadi ibu atau berkarier. Sebuah dilema yang tidak akan menjadi pertimbangan jika dia seorang laki laki.

Seorang perempuan yang bekerja pastinya akan lebih berprestasi jika kodrat perempuan sebagai seorang ibu juga dapat berjalan beriringan. Ada dua generasi kedepan yang harus dididik dan disiapkan untuk masa depan. Masa depan Indonesia juga tentunya.

Dari curhatan beberapa teman pemeriksa pajak perempuan ini, menjadi seorang pemeriksa atau auditor tidaklah berat, karena mereka dibekali ilmu pemeriksaan sebelum terjun dalam tugasnya. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa tantangan tiap kantor berbeda-beda tergantung wilayah kerja, lingkungan kerja, sejawat, dan atasannya.

Cerita-cerita pegawai perempuan di lingkungan DJP ini, dapat penulis simpulkan jauh dari apa yang dituntut oleh kaum feminis. Perempuan DJP adalah perempuan berpendidikan yang ingin berkontribusi lebih bagi dirinya, keluarganya, dan negara. Permasalahan yang dialami pegawai perempuan DJP khususnya dalam hal mutasi, layaknya dua sisi mata uang, tanggungjawab pekerjaan dan kodratnya sebagai ibu. Hal tersebut kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Seandainya perencanaan yang responsif gender yang tertuang dalam ketentuan PUG penyelesaian permasalahan dengan menerapkan mutasi dengan jangka waktu yang pasti akan memudahkan pegawai perempuan mengatur rencana buat anak anaknya.

Penulis: Indrayanti R Pangastuti (KPP LTO 3) Editor: Ifta Ilfia Utami



# **E-Bupot 21/26**

## Tanda Tanya Kepastian Hukum dalam Simplifikasi Penghitungan Pajak

ndang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) diterbitkan sebagai wujud reformasi perpajakan, antara lain mengatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan ketentuan baru tersebut, pengadministrasian perpajakan bagi penduduk Indonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif akan menggunakan NIK sebagai identitas wajib pajak. Termasuk wujud reformasi perpajakan adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa dan pekerjaan.

Lebih lanjut dalam proses reformasi pada pilar regulasi dan sistem perpajakan, pemerintah mengatur kembali ketentuan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58).

Tujuan diterbitkannya PP 58 antara lain untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap masa pajak dengan menggunakan tarif efektif. Selain itu, simplifikasi tarif tersebut akan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak.

Untuk melaksanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, wajib pajak harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168). PMK 168 mulai diberlakukan untuk pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa Pajak Januari 2024.

Dalam rangka penerapan PP 58 dan PMK 168, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membangun aplikasi untuk pembuatan Bukti Potong Elektronik dan pelaporan SPT PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26). Aplikasi berbasis web tersebut diakses melalui laman DJP Online. Penggunaan aplikasi online ini mengintegrasikan basis data wajib pajak, salah satunya dengan NIK sebagai NPWP orang pribadi.

Pada awal tahun 2024, penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk sudah diimplementasikan dalam pembuatan e-Bupot 21/26. Penggunaan aplikasi berbasis web ini sekaligus menjadi media yang mengakomodir kelanjutan proses validasi NIK menjadi NPWP.

Dalam penerapan e-Bupot 21/26, terdapat beberapa aduan yang substansial dari wajib pajak, antara lain:

Kegagalan pembuatan e-Bupot 21/26 untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP;

Bagi istri yang saat ini NPWP-nya bergabung dengan suami, NPWP suami tidak mengakomodir nama istri saat pembuatan e-Bupot 21/26 bagi istri yang bekerja;

Aplikasi e-Bupot 21/26 tidak mengakomodir tarif lebih tinggi 20% atas pemotongan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP.

Dengan beberapa permasalahan tersebut, wajib pajak perlu mendapatkan penegasan lebih lanjut karena masih terdapat beberapa benturan penerapan aplikasi perpajakan dengan ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan demi tercapainya kepastian hukum bagi wajib pajak.

Berikut beberapa pandangan penulis terkait tiga permasalahan tersebut:

#### Konsekuensi Kegagalan Pembuatan e-Bupot 21/26 Bagi Wajib Pajak Saat ini.

Permasalahan kegagalan pembuatan e-Bupot 21/26 tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal tersebut merupakan salah satu upaya DJP memacu pemadanan NIK menjadi NPWP sehingga administrasi perpajakan wajib pajak tidak tertunda dan tidak mengakibatkan terjadinya keterlambatan pemotongan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak.

Pemadanan NIK pada dasarnya merupakan kewajiban masing-masing pemilik NPWP. Namun, diperlukan sinergi yang baik dari berbagai pihak agar pemadanan NIK dapat tercapai secara menyeluruh sehingga penerapannya bisa dilakukan sesuai timeline yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemotong PPh Pasal 21/26 diharapkan melakukan *customer due diligence* dengan mengimbau karyawan atau pegawainya untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Selain itu, pemotong dapat mengajukan permohonan NIK menjadi NPWP secara kolektif dan elektronik dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai antisipasi terjadinya kegagalan pembuatan e-Bupot 21/26 akibat NIK yang belum dipadankan.

Di sisi lain, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK 136) menegaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024.

Namun, masih ada kemungkinan kegagalan pembuatan e-Bupot 21/26 bagi wajib pajak yang proses pemadanan NIK-nya belum berhasil. Hal tersebut berpotensi pengenaan denda keterlambatan pelaporan SPT PPh Pasal 21/26. Tidak ada ketentuan yang menjamin bahwa wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi atau denda akibat keterlambatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 karena NIK yang belum valid menjadi NPWP pada masa pajak sebelum 1 Juli 2024.

#### 2. Konsekuensi Penggunaan NIK Istri Karyawan dengan NPWP Menginduk Suami

Pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26 sebelum penerapan e-Bupot 21/26 dilakukan secara offline pada aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26. Pembuatan bukti potong pada e-SPT tersebut memungkinkan pemotong untuk melakukan penyesuaian data wajib pajak. Contohnya, bagi seorang istri bekerja yang NPWP-nya menginduk pada NPWP suami, nama suami bisa diganti dengan nama istri. Namun, pada e-Bupot 21/26, hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Pembuatan bukti potong pada e-Bupot 21/26 divalidasi secara sistem. NPWP yang diinput akan memanggil nama wajib pajak sesuai NPWP-nya. Konsekuensinya, nama suami yang muncul pada bukti potong istri yang bekerja dan NPWP-nya menginduk pada NPWP suami. Ini tidak dapat dilakukan perubahan nama secara manual menjadi nama istri.

Saat ini, pemotong PPh Pasal 21/26 menggunakan NIK istri agar nama istri muncul pada bukti potong. Untuk mengakomodir hal tersebut, suami harus melakukan pemadanan NIK istri pada daftar anggota keluarga di akun diponline suami. Pasal 2 PMK 136 menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, orang pribadi dalam negeri yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP. Merujuk pada ketentuan tersebut, jika seorang istri bekerja yang NPWP-nya menginduk kepada suami maka dibuatkan e-Bupot 21/26 menggunakan NIK istri.

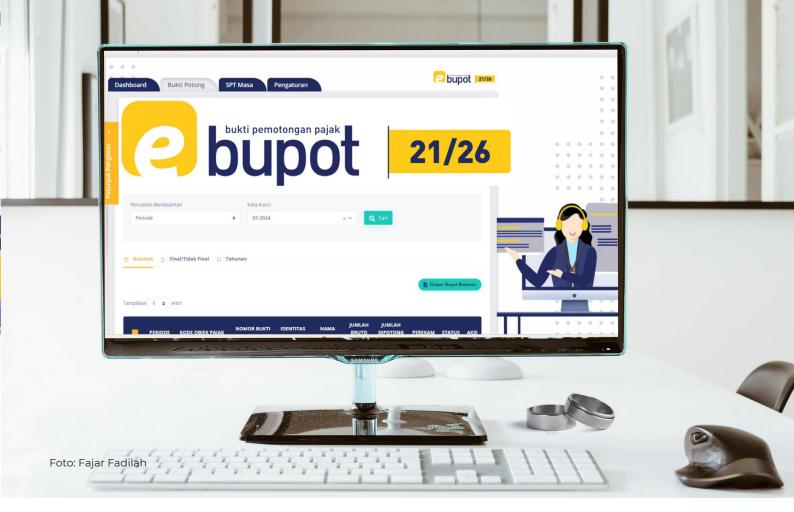
Sementara saat ini belum ada ketentuan yang menegaskan konsekuensi penggunaan NIK istri sebagai NPWP. Muncul beberapa pertanyaan atas permasalahan tersebut, antara lain:

- a. Apakah hal tersebut berkonsekuensi pada perubahan penghitungan PPh Orang Pribadi Tahunan;
- b. Apakah hal tersebut menggugurkan status NPWP istri yang sebelumnya menginduk dengan suami.

Jika penggunaan NIK Istri pada e-Bupot 21/26 berdiri sebagai NPWP istri sendiri maka seharusnya cara penghitungan PPh suami istri tersebut merujuk pada pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Suami istri tersebut melaporkan SPT Tahunannya dengan mekanisme menghitung terpisah (MT). Mereka mempunyai kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan sesuai proporsinya masing-masing.

Terlepas dari penjelasan sebelumnya, banyak istri yang bekerja sudah melakukan penghapusan NPWP dan melakukan penggabungan NPWP dengan suami. Oleh karena itu, perlu penegasan lebih lanjut mengenai ketentuan tentang petunjuk teknis penggunaan NIK istri sebagai NPWP, sehingga tercipta kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### 3. Konsekuensi Sanksi Bunga Terlambat Bayar untuk Wajib Pajak Tanpa NPWP



Wajib pajak yang belum memiliki NPWP mempunyai konsekuensi pemotongan PPh Pasal 21/26 lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Beberapa ketentuan dalam PER-16/ PJ/2016 sudah mengalami perubahan. Di antaranya penghitungan PPh Pasal 21 saat ini sudah merujuk pada PMK 168 dengan menggunakan tarif efektif seperti yang diatur dalam PP 58.

Sampai dengan tulisan ini dibuat, pasal 20 ayat (1) PER-16/PJ/2016 belum diubah. Sehingga secara substansi ketentuan tersebut dianggap masih berlaku. Namun, pada aplikasi e-Bupot 21/26, tarif lebih tinggi 20% tersebut tidak lagi diterapkan. Hal ini menjadi salah satu bentuk ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban

perpajakannya.

Jika pemotong PPh Pasal 21/26 tidak menerapkan tarif 20% lebih tinggi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP maka secara ketentuan akan terjadi kekurangan pembayaran PPh Pasal 21/26 pada saat terutangnya. Kemudian akan ada sanksi bunga kekurangan pembayaran atas kekurangan pemotongan tersebut yang dihitung sejak saat terutang sampai surat tagihan pajak dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa masih terdapat beberapa catatan pada aplikasi e-Bupot 21/26 yang belum sinkron dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu kiranya DJP membuat penegasan lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan dalam pemotongan PPh Pasal 21/26 serta pada aplikasi perpajakannya sehingga tercipta tujuan simplifikasi pemotongan PPh Pasal 21/26 yang jelas, efektif, efisien, dan tidak menimbulkan keraguan.

Penulis: Ifta Ilfia Utami Editor: Aditya Pradana Putra



# Labirin

ata "labirin" berasal dari bahasa Yunani "labyrinthos". Dalam mitologi Yunani, labirin adalah sebuah struktur rumit yang dibangun oleh Daedalus untuk Raja Minos dari Kreta. Struktur ini dirancang sedemikian rupa agar Minotaur, makhluk setengah manusia dan setengah banteng, tidak bisa keluar.

Theseus, seorang pahlawan Yunani, akhirnya berhasil memasuki labirin dan membunuh Minotaur dengan bantuan benang yang diberikan oleh Ariadne, putri Raja Minos, untuk menandai jalannya keluar.

Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Latin sebagai "labyrinthus" dan akhirnya menjadi "labirin" dalam bahasa Indonesia. Labirin awalnya digunakan untuk merujuk pada struktur fisik yang kompleks dan berliku-liku, tetapi sekarang juga sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan situasi yang rumit dan sulit dipecahkan.

Saya sendiri kerap menggunakan kata "labirin" untuk menggambarkan kondisi gedung KPP Migas. Pasalnya, di bagian dalam gedung kantor yang khusus menangani perusahaan migas ini terdiri dari banyak lorong yang bercabangcabang. Lorong-lorong itu berada di bagian sisi dan melingkari ruang-ruang kerja.

Pada awal penempatan di KPP ini, saya butuh beberapa bulan untuk tidak kesasar kala menuju ke ruangan lain. Maklum saja, gedung ini konon dulunya adalah gedung olahraga (GOR). Ketika adanya perubahan nomenklatur dari KPP Badora Dua menjadi KPP Migas, gedung sarana olahraga para pegawai KPP Khusus itu disulap menjadi gedung kantor.

Terkadang saya merasa tak enak hati kalau mengundang wajib pajak yang merupakan perusahaan kelas kakap. Para wajib pajak yang biasanya diwakili oleh top manager, saya ajak melewati lorong terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pertemuan. Mungkin itu cukup kontras dibandingkan dengan gedung kantor mereka yang pastinya megah dan mewah.

Meski begitu, tiap ruang kerja dan ruang pertemuan telah dibuat memenuhi standar ruang kerja modern yang disyaratkan di lingkungan DJP. Ruang kerja itu merupakan ruang terbuka. Masing-masing meja kerja para pegawai dibatasi oleh partisi. Demikian pun ruang pertemuannya. Tiap-tiapnya dilengkapi dengan perlengkapan layaknya sarana pertemuan.

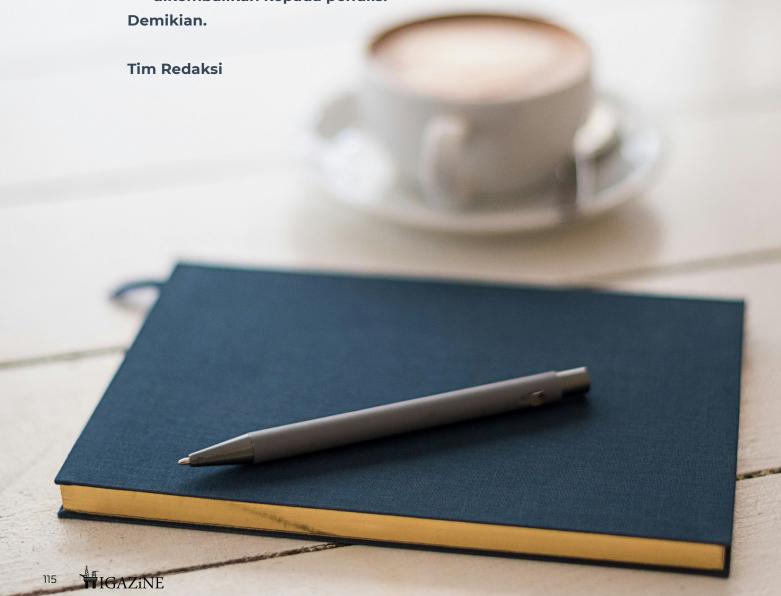
Dari keterbatasan gedung seperti itu, selama tiga tahun terakhir target penerimaan pajak yang diamanahkan KPP Migas terlampaui. Jumlahnya tak kaleng-kaleng, yakni kurang dan lebih dari seratus triliun rupiah. Tak hanya itu, di bawah arahan dan bimbingan kepala kantor, dari gedung bekas GOR itu muncul ide-ide kreatif demi menunjang visi dan misi DJP. Dua di antaranya, lahirnya Migazine dan Migas TV.

Saya bangga pernah berada selama empat tahun di gedung labirin itu. Sebelum akhirnya mutasi ke kantor sekarang. Yang partisi merupakan barang mewah di dalamnya. (Ahmad Dahlan)

# Dari Meja Redaksi

Redaksi Migazine menerima kontribusi tulisan berupa opini dari selain pegawai KPP Minyak dan Gas Bumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tema terkait dengan perpajakan.
- 2. Panjang tulisan 700-1200 kata, menggunakan jenis font Arial size 11 dengan spasi 1,5.
- 3. Tulisan belum pernah ditayangkan di media mana pun.
- 4. Tim Redaksi Migazine berhak menyunting tulisan tanpa mengubah substansi.
- 5. Tulisan yang layak tayang akan menjadi milik Migazine. Penulis berhak membagikan ke media sosial dengan mencantumkan tautan Migazine.
- 6. Tulisan yang tidak layak tayang akan sesegera mungkin dikembalikan kepada penulis.







Info selengkapnya:

www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax



## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

### **KPP MINYAK DAN GAS BUMI**

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan 12760 Telp.: (021)79194831, 79194911 Fax. (021) 79194852

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak 1500200

(D) Layanan Helpdesk: 0812 6000 9380 Layanan Lainnya: 0852 8331 2136

(a) @pajakmigas

kpp.081@pajak.go.id

(D) KPP Minyak dan Gas Bumi

(f) KPP Minyak dan Gas Bumi

http://pajak.go.id http://pipamigas.net/web/?page=migazine



